EDISI 902/20 - 30 NOVEMBER 2026

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

Diduga Korupsi, Eks Kadis ESDM Jatim Ditahan

SURABAYA, BN – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur periode 2024 berinisial Nurkholis (NK) sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan

■ Bersambung ke hal.9 kol.1



Tersangka NK diborgol dijebloskan sel.

DPR SAHKAN RUU PERAMPASAN ASET JADI UNDANG-UNDANG

BREAKING NEWS LIPUTAN KHUSUS

❑ ICW : Banyak Pasal Raib, Akan Diuji ke MK

JAKARTA, BN- DPR RI melalui rapat paripurna telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang, Kamis (19/11). Mengapa kelompok-kelompok sipil mempersoalkan penghilangan sejumlah pasal penting dalam draf yang lama?

KETUA DPR Puan Maharani, yang memimpin rapat paripurna DPR, Kamis (19/11), meminta persetujuan kepada anggota DPR di ruangan rapat. "Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan

"Setuju," jawab peserta rapat. "Alhamdulillah," kata Puan seraya mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset telah sah menjadi Undang-Undang.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di parlemen telah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11).

Mereka sepakat membawa RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

Mulai digagas 23 tahun lalu, RUU ini sejak awal disuarakan oleh pegiat anti korupsi, tetapi tidak benar-benar untuk segera direalisasikan secepatnya.

Sejak diajukan ke DPR pada 2010, penyusunan draf dan naskah akademik mulai berjalan sejak September 2025 hingga Januari 2026. Puncaknya, pembahasan RUU Perampasan Aset direspons cepat

■ Bersambung ke hal.9 kol.1



Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) saat Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

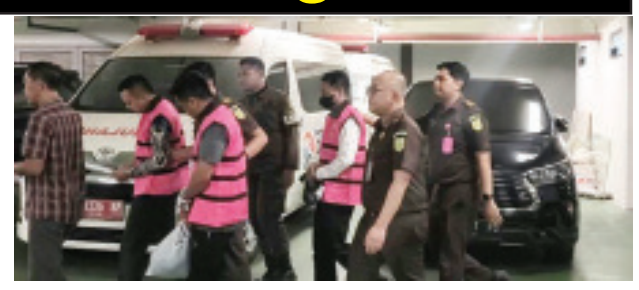
Korupsi KUR BNI Jember, Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru

SURABAYA, BN – Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember Tahun 2021–2023 terus berkembang. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan empat orang tersangka baru pada Senin (16/11/2026).

Keempat tersangka tersebut yakni ASH selaku Direktur CV Karomah Jaya Mandiri yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 10 November 2026, serta A dan JAC masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, dan HP selaku Pgs BNI Kalisat. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan MFH selaku Pemimpin Cabang BNI Jember dalam penyimpangan penyaluran KUR melalui pola channeling dengan melibatkan Collection Agent.

"Dalam penyaluran KUR Mikro ini ditemukan penyimpangan berupa penggunaan identitas masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur karena bukan petani dan tidak

■ Bersambung ke hal .9 kol.5



Empat tersangka baru Korupsi KUR BNI Jember saat digiring ke sel tahanan Kejati Jatim. **(Ist)**

Khofifah Lantik Enam Pejabat Eselon II : Minta Tancap Gas, Adaptasi dan Kolaborasi Program Prioritas



Gubernur Khofifah memberikan ucapan kepada para pejabat yang baru saja dilantik (ist)

SURABAYA, BN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/14752/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Enam pejabat yang dilantik yakni Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian.

Kemudian, Syamsiar Aulia Rahman sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, serta Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah mengatakan, pengisian enam jabatan tersebut dilakukan setelah melalui tahapan seleksi dan mekanisme yang profesional serta terukur.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Saat Bupati Ipuk dan Bupati Rio Saling Lempar Pujian



Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di Pendopo. **(hms)**

BANYUWANGI, BN – Suasana hangat mewarnai pertemuan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di Pendopo Banyuwangi, Selasa (17/11/2026). Keduanya saling melontarkan pujian saat membahas kemajuan dan upaya pembangunan di masing-masing daerah.

Bupati Rio yang datang bersama jajaran Pemkab Situbondo mengaku banyak hal yang ingin dipelajari dari Banyuwangi. Menurutnya, Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam pengembangan inovasi dan tata kelola pemerintahan.

"Banyuwangi ini laboratorium yang sangat menonjol untuk belajar banyak hal. Bagi saya, belajar ke daerah tetangga bukan sesuatu yang memalukan, justru menjadi keharusan. Ilmu itu harus didatangi dan disowani. Karena itu, kami datang ke Banyuwangi untuk ngangsu kaweruh," ujar Rio.

Salah satu hal yang ingin dipelajari adalah pengawalan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta sistem monitoring kinerja pemerintahan daerah yang dinilai berjalan baik di Banyuwangi.

"Saya berharap Mbak Ipuk dan Pak Sekda tidak pelit berbagi ilmu. Kami di sini siap belajar apa saja demi kemajuan Situbondo," imbuhnya. Rio juga mengenang masa kecilnya yang kerap singgah ke Banyuwangi bersama mendiang ayahnya.

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Mengucapkan

Selamat Hari Jadi

Pamekasan Ke-496 Tahun 2026

Bupati Pamekasan



Drs. Kholilurrahman, SH,M.Si.

Wakil Bupati Pamekasan



H. Sukriyanto

Sekda Pamekasan



Drs. Taufikurrahman, M.Si.

Kepala Diskominfo



Muttqin, S.Sos, M.Si.

Kepala Diskop UKM dan Tenaga Kerja



Dr. Salehoddin, M.Ak.

Plt. Direktur RSUD Smart



Dr. Syaiful Hidayat, Sp.P.

Kadis Perikanan



Drs. Abdul Fata, M.Si

Bupati Subandi Tekankan Harmonisasi Aparatur Desa, Kunci Percepatan Pembangunan

SIDOARJO, BN- Harmonisasi antara kepala desa, lurah, sekretaris desa, dan seluruh perangkat pemerintahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

HAL tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Porong di Royal Hotel Tretes, Pasuruan, (8/11).

Subandi menegaskan, harmonisasi dan profesionalisme aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan. Karena itu, hubungan kerja yang solid antara kepala desa, lurah, dan perangkatnya harus terus dijaga.

"Harmonisasi dan profesionalisme juga merupakan kunci percepatan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan," tegas Subandi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan, sekretaris kecamatan, para kepala desa, lurah, serta perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Porong.

Dalam kesempatan itu, Subandi mengapresiasi semangat para peserta yang tetap mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur meski pelatihan dilaksanakan pada hari libur.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan desa harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting agar pelayanan publik dan pembangunan dapat berjalan optimal.

Subandi, yang pernah menjabat sebagai kepala desa, turut mengingatkan bahwa ketidakharmonisan antara kepala desa dan perangkatnya berpotensi menghambat jalannya pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan."Saya ingin antara pemerintah desa dan kelurahan dengan perangkatnya terbangun harmonisasi yang baik. Kalau kepala desa dan lurah beserta perangkatnya tidak sinkron, maka pemerintahan akan terganggu dan pembangunan menjadi terhambat," ujarnya.

Karena itu, ia meminta camat dan sekretaris kecamatan untuk terus melakukan pembinaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan guna menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain harmonisasi, Subandi juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan RAPBDes, hingga penetapan APBDes.Ia meminta setiap kepala desa memiliki roadmap pembangunan yang jelas agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi, berkomitmen mendukung pembangunan desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2027, bantuan tersebut direncanakan mencapai sekitar Rp600 juta untuk setiap desa.

"Insyaallah tahun 2027 BKK untuk desa kurang lebih sebesar Rp600 juta per desa. Ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan," katanya.

Selain BKK, Pemkab Sidoarjo juga mengoptimalkan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagai instrumen percepatan pembangunan. Program tersebut diharapkan memperkuat peran camat dalam merespons kebutuhan masyarakat di wilayahnya. "PIWK kami hadirkan untuk memperkuat peran camat dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan percepatan pembangunan wilayah. Dengan PIWK, kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan, normalisasi saluran, dan infrastruktur dasar lainnya dapat ditangani lebih cepat," jelasnya.

Subandi menambahkan, sinergi antara dukungan PIWK di tingkat kecamatan dan BKK di tingkat desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.



Bupati Sidoarjo Subandi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), di Royal Hotel Tretes, Pasuruan. **(foto: ist)**

Sementara itu, Pj Camat Porong Aan Ali Fauzan mengatakan, kegiatan bimtek tersebut merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Porong dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dan kelurahan melalui pembinaan serta pengawasan berkelanjutan.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan materi mengenai pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta peningkatan profesionalisme aparatur.

Menjelang musim hujan, Subandi juga mengajak kepala desa, lurah, perangkat, dan masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong serta kerja bakti dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi potensi persoalan akibat cuaca.

Ia berharap kegiatan bimtek tersebut dapat menjadi bekal bagi aparatur desa dan kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah masing-masing.

"Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kecamatan Porong maupun Kabupaten Sidoarjo," pungkasnya.

(Adv/Teddy Syah)

Betonisasi Krian-Kemangsen Capai 93 Persen, Pemkab Sidoarjo Pastikan Tepat Waktu


Proyek Betonisasi Ruas Jalan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Krian–Kemangsen. (ist)

SIDOARJO, BN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat pengawasan terhadap sejumlah proyek betonisasi jalan yang tengah berlangsung. Langkah tersebut dilakukan bertujuan untuk memastikan pengerjaan proyek berjalan sesuai target dan rampung tepat waktu. Salah satu proyek yang kini memasuki tahap penyelesaian adalah betonisasi ruas Jalan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Krian–Kemangsen. Progres pengerjaan jalan tersebut telah mencapai 93 persen.

Proyek strategis Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp 3,6 miliar itu ditargetkan rampung sepenuhnya pada 15 Desember 2026, sesuai batas akhir kontrak pekerjaan.

Pengawasan intensif tersebut merupakan tindak lanjut instruksi langsung Bupati Sidoarjo Subandi. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Subandi mendapati pengerjaan proyek sempat tertinggal dari target akibat kendala teknis pembongkaran beton lama.

Saat itu, penggunaan ekskavator tipe 200 dinilai kurang maksimal dalam proses pembongkaran. Subandi kemudian menginstruksikan penambahan unit breaker ekskavator serta meminta konsultan pengawas memperketat pemantauan dan menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan setiap hari.

"Pengawasan ketat dilakukan secara berkesinambungan. Selain evaluasi laporan harian konsultan pengawas melalui aplikasi E-Kenda, Pemkab Sidoarjo juga memantau langsung dari udara menggunakan drone untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan target," ujar Subandi, (15/11).

Pengawasan tersebut turut mendorong percepatan pengerjaan di lapangan. Asisten Pelaksana Proyek, Supriyanto, mengungkapkan bahwa pekerjaan utama berupa struktur beton kaku (rigid pavement) sepanjang 465 meter, lebar 7 meter, dan ketebalan 30 sentimeter telah selesai.

"Progres pengerjaan di lapangan saat ini sudah mencapai 93 persen. Pengecoran beton utama, pengurukan Lapis Pondasi Atas (LPA), hingga pemasangan Lean Concrete (LC) setebal 10 sentimeter telah rampung," terang Supriyanto.

Saat ini, kontraktor tengah menyelesaikan sejumlah pekerjaan pendukung. Di antaranya pembangunan bahu jalan di sisi kanan dan kiri masing-masing selebar satu meter, pemasangan marka jalan, serta pengaspalan sambungan sepanjang 30 meter.

Pengaspalan sambungan tersebut dilakukan mulai dari lampu merah hingga perempatan RPH untuk menghubungkan struktur beton baru dengan ruas jalan lama. Supriyanto optimistis seluruh pekerjaan pendukung dapat diselesaikan sebelum batas akhir kontrak pada 15 Desember 2026. Ia memastikan sisa pengerjaan terus dikejar agar proyek segera tuntas.

"Untuk sementara, ruas jalan ini baru bisa dilalui kendaraan roda dua sambil menunggu proses pematangan beton dan serah terima pekerjaan," pungkasnya. **(Adv/Teddy Syah)**

Ahli Waris Perusahaan Kosmetik di Sidoarjo Gugat Rp 350 Miliar


Pengacara penggugat, Irawan Sukma saat di PN Sidoarjo. **(Teddy Syah)**

SIDOARJO, BN – Dugaan perselisihan internal keluarga p Sengketa Saham Perusahaan Kosmetik di Sidoarjo, Ahli Waris Gugat Rp 350 Miliar. Pendiri sebuah perusahaan yang bergerak di industri kosmetik berinisial PT RBK di Sidoarjo berujung ke ranah hukum. Salah satu pihak yang mengaku sebagai ahli waris pendiri perusahaan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Penggugatnya yakni, Antoni Prabowo Handojo, melayangkan gugatan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan pengelolaan perusahaan. Dalam perkara tersebut, penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan total mencapai Rp350 miliar.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 202/Pdt.G/2026/PN SDA. Sejumlah pihak yang digugat di antaranya badan usaha, jajaran direksi, termasuk Direktur Utama berinisial KT. Kuasa hukum penggugat, Irawan Sukma, mengatakan gugatan tersebut ditempuh setelah upaya penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan tidak membuahkan hasil.

Menurutnya, pihak penggugat telah melayangkan dua hingga tiga kali somasi kepada pihak-pihak terkait. Namun, somasi tersebut diklaim tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

"Prinsipal kami adalah Pak Antoni Prabowo Handojo, selaku anak atau ahli waris dari salah satu pendiri perusahaan. Oleh karena itu, kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Sidoarjo," kata Irawan, (18/11).

Irawan menjelaskan, perkara tersebut telah melewati tahapan mediasi dan jawab-menjawab. Saat ini, persidangan telah memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing pihak yang berperkara.

Dalam gugatan tersebut, terdapat lima pihak sebagai tergugat dan tiga pihak lainnya berkedudukan sebagai turut tergugat. Mereka terdiri atas badan usaha, jajaran direksi, notaris, serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi badan hukum.

Terkait proses mediasi, Irawan menyebut belum tercapai kesepakatan antara para pihak. Pihaknya juga telah menyampaikan keberatan kepada hakim mediator atas ketidakhadiran sejumlah prinsipal dari pihak tergugat maupun turut tergugat.

"Kami telah melayangkan protes kepada hakim mediator mengenai ketidakhadiran prinsipal para tergugat tersebut, sementara klien kami selalu hadir. Namun, proses mediasi belum menghasilkan kesepakatan," ujarnya.

Meski belum menemukan titik temu, pihak penggugat memastikan akan melanjutkan proses hukum hingga memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan. "Belum ada titik

■ **Bersambung ke hal.11 kol.5**

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI
BIDIK NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999
PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB :** Edy Sutanto. **PEMIMPIN PERUSAHAAN :** Teddy Syah Roni. **PENASEHAT HUKUM :** Yustinus Haryanto, SH. **REDAKTUR PELAKSANA :** Budi Santoso. **REDAKTUR :** A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. **TIM LIPUTAN KHUSUS :** Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto, Supardi. **JAWA TIMUR : SURABAYA :** Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. **SIDOARJO:** Nur Yahya. **GRESIK :** Ariadi AM, Subkan Arif. **PAMEKASAN :** Ainur Halis. **SUMENEP :** Adi Yusman, Ishak. **SAMPANG** : Holillurohman. **MOJOKERTO :** Husnan. **JOMBANG :** Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. **NGANJUK :** Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. **KEDIRI :** Nyoto Dharmawan. **TULUNGAGUNG/TRENGGALEK :** Nik Atin. **MADIUN:** Basuki. **NGAWI :** Yoseph, Suwarsana. **MAGETAN :** Ashar AR. **PONOROGO :** Andhy Wijaya. **LAMONGAN :** Syaiful Anam, Joko Santoso. **BOJONEGORO :** Priyanto. **MALANG RAYA :** Nino Wiwantara. **BLITAR :** Budi Sastro. **PASURUAN :** Toddy Pras Hendarto, **PROBOLINGGO/LUMAJANG :** Sonny Narwani. :**JEMBER :** Agus Budiono. **SITUBONDO :** Agung Chornelis (Kabiro), Hari Sulistyo. **BONDOWOSO :** Rukwandanu. **BANYUWANGI :** Djoni DW (Kabiro), Suripto, Sugeng Purnomo. **JAWA TENGAH** : **BLORA :** Mugianto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. **REMBANG:** Didik Eko Sulistiwan. **WONOGIRI :** Heryanto. **SEMARANG RAYA :** Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. **PEKALONGAN RAYA :** Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. **BATANG :** Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. **KENDAL :** Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. **KUDUS :** Budi Setiawan. **GROBOGAN :** Heru Budianto. **SALATIGA :** Susilo Haryadi. **BOYOLALI** : Ahmad Mukhlis (Kabiro). **TEMANGGUNG :** Novan Argunanto. **JAWA BARAT : CILACAP :** Eko Prionggo Dewo, Suyatno. **MAGELANG:** Marno, ST. **BANDUNG :** Zaenal Ikhsan (Kabiro). **CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN :** Asep Sujana, Karsono. **SUMEDANG:** Ernawan Hidayat. **SUBANG :** Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. **INDRAMAYU :** Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. **DEPOK :** Harahap (Kabiro), Fajar. **BEKASI :** Abdul Rachman. **KUNINGAN:** Edwar Panata Muda. **PURWAKARTA:** Anthon Pontoh, Endin. **BOGOR :** Liswandi (Kabiro), Firdaus. **JAKARTA/BANTEN :** Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. **BALI :** Agung Wiarto. **SULAWESI SELATAN : SOPPENG/WAJO :** Anwar Paturusi (Kabiro). **PINRANG**: Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. **BONE** : Edy Suspi AB. **JENEPONTO :** Aswin R. **SULAWESI UTARA :** Hilda Pusung. **MANADO**: Affandi Masloman. **KOTAMOBAGU/BMR** : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. **GORONTALO :** Rifly Tama'un. **SULAWESI BARAT :** Andi Firmansyah. **HALMAHERA SELATAN :** Anwar Suleman. **KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA**: Effendi (Kabiro). **KALIMANTAN BARAT** : Sofyan Hadi. **KETAPANG** : Sukarto. **KALIMANTAN UTARA** : Syamsudin (Kabiro). **KEPRI : KARIMUN :** Joy Tivani Hutasoit (Kabiro), Timbul Maradona Hutasoit, SH. **BENGKALIS :** Agung Mulyono. **KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN**: Handoko **KEP NATUNA**: Amir Hamzah. **RIAU:** Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). **BENGKALIS/ROHIL :** Rusdi, SH. **SUMATERA SELATAN : PALEMBANG :** Yanthi Mahameru. **LAHAT/MUARA ENIM :** Adi Nurahman. **PAGAR ALAM** : Marleo Tanjung. **OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN :** M Azhary MY, **OKU TIMUR :** Nelis Sri Wahyuni. **OKI :** Nurlis Oktari. **SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN:** Muhammad Syafei Harahap. **LABUHANBATU :** M. Sukma (Kabiro). **PAKPAK BHARAT :** Tennang Tumangger (Kabiro), Dariono. **DELI SERDANG :** Heri Siswoyo. **ASAHAN :** Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Arnes, Faoziduhu Hulu. **NIAS UTARA** : Hadirat Syukur Harefa. **NIAS BARAT :** Odaligo Zai. **TAPANULI SELATAN** : Amir Hamzah Nasution. **BINJAI :** J. Saragih. **SUMATERA BARAT : PASAMAN:** Suryadarma (Kabiro), Refdinal. **LAMPUNG : WAY KANAN :** Arye M Jahri. **LAMPUNG TIMUR :** Nuhyin, Mueshin, Antoni. **LAMPUNG UTARA :** Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari **LAMPUNG SELATAN**: Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. **LAMPUNG BARAT / PESISIR BARAT :** M. Taufik **TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT** : Indra Wijaya, Hendra Jaya. **PRINGSEWU** : Iskandar. **BANDAR LAMPUNG :** Suhartono Hariwibowo. **TANGGAMUS :** - **NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES** : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. **SUBULUSSALAM** : Agus Darminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. **ACEH SINGKIL** :Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. **BIREUM :** Hendra S. **BANGKA BELITUNG:** Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. **JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT:** Joni Efendi. **TEBO :** Wendri Putra Rezky. **NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM**: Hidayatul Aini (Kabiro). **PAPUA :** Junjungan Silalahi. **LAYOUT/IT** Nur Hayati **PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN**: Dita Zahra Amalia. **PENERBIT** : PT Bidik Nasional Pers (BNP). **AKTE NOTARIS** : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. **SK MENKUMHAM** : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. **AKTE NOTARIS PERUBAHAN** : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. **SK MENKUMHAM PERUBAHAN** : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 **NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO:** 0220105231819. **NPWP**: 72.007.891.4-617.000. **ALAMAT** : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. **JAKARTA** : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. **BANK**: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. **WEBSITE** : https://bidiknasional.com.**Percetakan :** PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com
SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Tanah Bekas Galian Proyek Pelebaran Jalan Kedunggalar–Jogorogo Diperjualbelikan

NGAWI, BN – Praktik dugaan jual beli tanah bekas galian (disposal) proyek pelebaran jalan utama Kedunggalar–Jogorogo milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi menuai protes masyarakat setempat.

Tanah sisa galian proyek yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum tersebut diduga diperjualbelikan oleh oknum dengan tarif Rp150.000,00–Rp200.000,00 per rit truk jungkit (dump truck).



Lokasi pengerukan tanah proyek pelebaran jalan Kedunggalar–Jogorogo milik Dinas PUPR Kabupaten Ngawi yang material sisanya menuai polemik akibat dugaan praktik jual beli ilegal. **(Yoseph)**

Kondisi ini sangat disayangkan oleh warga, khususnya di Dusun Kaliwowo, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar.

Pasalnya, pengurus di tingkat Rukun Tetangga (RT) setempat yang berencana memanfaatkan tanah bekas galian tersebut untuk menguruk jalan lingkungan justru ikut dibebani ongkos sebesar Rp150.000,00 hingga Rp200.000,00 per truk.

"Sangat disayangkan, padahal tanah itu rencananya mau dimanfaatkan warga tiap-tiap RT di Dusun Kaliwowo untuk memperbaiki dan menguruk jalan lingkungan. Namun, setiap mau mengambil tanah diminta ongkos antara Rp150.000,00 sampai Rp200.000,00 per truk jungkit," keluh salah satu ketua RT di Dusun Kaliwowo yang ditemui wartawan Bidik Nasional.

Berdasarkan penelusuran langsung tim Bidik Nasional di lokasi proyek, aktivitas transaksi pengambilan tanah bekas galian tersebut memang benar terjadi.

Saat dikonfirmasi di lapangan, seorang pria yang mengaku sebagai petugas keamanan alat berat proyek mengklaim bahwa dirinya yang bertanggung jawab mengatur serta membagi distribusi tanah bekas galian kepada para pemesan.

(yoseph)

Puluhan Bangunan Liar di Frontage Road Sidoarjo Ditertibkan



Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yani Setyawan. **(Teddy Syah)**

SIDOARJO, BN – Penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang Frontage Road (FR) Sidoarjo berlanjut ke segmen Buduran. Sebanyak 25 bangunan yang mayoritas digunakan sebagai warung kopi (warkop) dan tempat usaha lainnya ditertibkan petugas gabungan pada Senin (16/11) pagi.

Penertiban tersebut melibatkan lebih dari 400 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri. Petugas menyasar sejumlah bangunan yang masih berdiri di sepanjang jalur Frontage Road segmen Buduran.

Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yani Setyawan, mengatakan bahwa penertiban kali ini menyasar 25 bangunan dari total lebih dari 180 bangunan yang berada di kawasan tersebut. Menurut Yani, sebagian besar pemilik bangunan telah menunjukkan kesadaran dengan melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum petugas turun ke lokasi. Kondisi tersebut turut memperlancar proses penertiban. "Alhamdulillah, sebagian besar sudah sadar untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri," ujarnya, Senin (16/11).

Ia menjelaskan, pengerahan ratusan personel gabungan bertujuan memastikan kegiatan penertiban berjalan tertib dan lancar. Sekitar 200 personel TNI-Polri diterjunkan, ditambah sekitar 200 anggota Satpol PP Sidoarjo.

Meski demikian, penertiban tidak dilakukan terhadap seluruh bangunan yang berada di kawasan tersebut. Sejumlah bangunan yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk sementara tidak menjadi sasaran pembongkaran.

Yani mengatakan, bangunan yang memiliki SHM akan ditangani secara terpisah. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang koordinasi dengan pemilik bangunan serta pihak terkait mengenai status kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

Pihaknya berencana memanggil para pemilik bangunan yang memiliki SHM guna membahas persoalan tersebut. Pemerintah daerah selanjutnya akan menentukan langkah penanganan berdasarkan hasil koordinasi.

(Teddy Syah)

Prestasi Gemilang Atlet MMA Sidoarjo, Sumbang 7 Medali di POPDA XV Jatim 2026

Sidoarjo, BN- Atlet Mixed Martial Arts (MMA) Kabupaten Sidoarjo menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026, yang diselenggarakan di Kabupaten Ngawi.



Kadisporapar Kabupaten Sidoarjo, Rudi Setiawan, bersama Atlet MMA Sidoarjo. **(Teddy Syah)**

Kontingen MMA Sidoarjo berhasil membawa pulang tujuh medali, terdiri atas lima medali emas, satu medali perak dan satu perunggu.

Tujuh medali diraih antara lain diperoleh:

Aufar Nizam Alghifahri pada kelas Youth B 40 kg putra.

Kemudian, Ice Septia Anggraeni berhasil meraih emas di kelas Youth B 44 kg putri. Medali emas berikutnya disumbangkan Moch Kenzie Rabbani Diwangkara pada kelas Youth B 52 kg putra. Sementara itu, Sindy Brilian Rachma Novrilia meraih emas pada kelas Youth A 52,2 kg putri. Emas kelima diraih Nayla Aulia Firsyansyah pada kelas Youth A 47,7 kg putri. Adapun satu medali perak, disumbangkan Naufar Rafif Al Fathan pada kelas MMA Youth 52,2 kg putra.

Serta satu perunggu, disumbangkan oleh Kinsay Naufal Muchlison.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengapresiasi capaian para atlet MMA tersebut.

Menurutnya, raihan lima medali emas dan satu perak menjadi bukti kerja keras atlet, pelatih, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan olahraga itu.

"Prestasi Mereka patut kita apresiasi. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga semangat berlatih, dan mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo di berbagai kejuaraan mendatang," ujarnya, (13/11).

Perlu diketahui, dalam ajang Popda XV Jatim 2026 tersebut Sidoarjo finish diposisi Runner-up Atau kedua dengan mengoleksi, 45 Emas, 46 Perak dan 46 Perunggu.

(Teddy Syah)

Usut Dugaan Korupsi Proyek Pos Jaga Pemkab Jombang, Inspektorat Jangan Tutup Mata



Kondisi bangunan pos jaga Pemkab Jombang yang bagian cat dindingnya sudah tampak mengelupas. **(ist)**

JOMBANG, BN – Salah satu pejabat publik, yakni Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Jombang, tampaknya "kebakaran jenggot" setelah diberitakan oleh media Bidik Nasional (BN) terkait proyek bangunan pos penjagaan yang dibangun di samping kantor Bapenda (belakang UPT Dinas Perpustakaan).

Awalnya tidak ada papan proyek, sekarang buru-buru sudah dipasang. Setelah papan proyek tersebut dipasang, ada indikasi bahwa Kabag Umum, Mohammad Erik Arif, S.STP., M.M., menunjukkan reaksi panik, marah, atau cemas. Reaksi ini muncul ketika media BN membongkar dugaan penyimpangan wewenang atau kinerja buruk ke ranah publik, sehingga papan proyek tersebut diduga sempat disembunyikan.

Proyek "siluman" di Pemkab Jombang dalam dinamika komunikasi politik dan kebebasan pers memicu krisis citra dan reputasi. Kondisi ini umumnya dipicu oleh beberapa faktor. Penyebabnya, salah satu oknum pejabat Pemkab Jombang tersebut (Kabag Umum) diduga "kebakaran jenggot" karena mengalami krisis citra dan reputasi akibat pejabat publik sering kali terjebak dalam permainan pencitraan. Ketika wartawan merilis berita investigasi yang objektif, "topeng moral" atau citra positif yang dibangun dengan biaya besar seketika runtuh di mata masyarakat. Bila dicermati, berita pada edisi lalu bisa menjadi pintu masuk bagi Inspektorat untuk memulai penyelidikan.

Awalnya papan proyek tidak terpasang, lalu setelah diberitakan, papan proyek buru-buru dipasang. Ketika tim BN meninjau kembali bangunan pos jaga di lapangan, tembok bagian belakang ada yang mengelupas dan terlihat retak yang sengaja ditutupi menggunakan cat tebal. Selain itu, pada papan proyek tidak dicantumkan keterangan "volume". Namun, keburukan yang sengaja disembunyikan akhirnya terlihat juga. Seharusnya Inspektorat turun ke lapangan dan tidak menutup mata terhadap penggunaan uang dari keringat rakyat.

Beberapa saat kemudian, BN menghubungi Candra, staf Bagian Umum sekaligus orang kepercayaan Kabag Umum, melalui ponselnya, tetapi tidak pernah diangkat. Setali tiga uang, baik Kabag Umum maupun Candra menutup diri untuk dikonfirmasi. "Hal ini menunjukkan bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik di Bagian Umum Pemkab Jombang tidak pernah disosialisasikan oleh "bos" mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabag Umum merupakan anak buah kesayangan "bos" mereka dan mungkin sengaja dilindungi, bahkan seakan tutup mata terhadap kinerja bawahannya," ungkap sumber media ini saat ditemui di Jombang, Selasa (10/11). Akibatnya, Kabag Umum diduga merasa menepuk dada, kebal hukum, dan tidak takut akan konsekuensi hukum.

Sejauh itu masih kata sumber tersebut, berbeda dengan beberapa Kabag Umum sebelumnya yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik, pejabat yang sekarang agak sulit untuk dikonfirmasi. Proyek pos jaga ini patut disorot dan dicurigai karena adanya dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang (kekuasaan). Di era keterbukaan informasi, tekanan publik akibat pemberitaan media yang viral bisa memaksa atasan untuk mengingatkan atau mencopot pejabat yang bermasalah.

"Perlu diingat, pers berfungsi sebagai watchdog (anjing penjaga) demokrasi dan kontrol sosial. Respons pejabat yang "kebakaran jenggot" seperti Kabag Umum Pemkab Jombang justru sering kali menjadi indikator bagi publik bahwa apa yang diberitakan oleh wartawan BN mengandung kebenaran yang berusaha ditutupi," pungkasnya. **(Tok)**

Limbah B3 Dibuang di Hutan Wonosalam

JOMBANG, BN – Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak serius bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Menindaklanjuti laporan dugaan pembuangan limbah B3 di Kecamatan Wonosalam pada 16 November 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang bergerak cepat dengan menerjunkan tim ke lokasi bersama pihak Kecamatan Wonosalam, Polsek, dan Koramil setempat pada 17 November 2026.



Limbah B3 yang dibuang sembarangan diberi garis polisi.

Dari hasil peninjauan, petugas menemukan tiga titik pembuangan limbah yang berada di lokasi berdekatan. Berdasarkan identifikasi awal terhadap karakteristik limbah, material yang dibuang diduga berupa slag aluminium yang termasuk dalam kategori limbah B3. Untuk memastikan jenis limbah tersebut, petugas telah mengambil sampel guna dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut.

Pembuangan limbah diduga dilakukan secara curah menggunakan kendaraan angkut jenis dump truck. Sebagai langkah awal penanganan, petugas telah memasang garis pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan risiko paparan limbah.

Karena proses penyelidikan memerlukan pendalaman terkait sumber limbah, alat transportasi yang digunakan, serta langkah pemulihan dan penanganan lingkungan, DLH Kabupaten Jombang telah mengirimkan surat kepada Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup wilayah Jawa Timur untuk meminta bantuan dalam proses penyidikan.

Kepala DLH Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah peduli dan aktif melaporkan dugaan pencemaran lingkungan. Ia juga menegaskan komitmen pihaknya untuk menangani kasus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Limbah B3 diketahui memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah ini dapat mencemari air, tanah, dan udara. Sementara itu, paparan limbah B3 terhadap manusia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta gangguan pada jaringan paru-paru dan hati. **(Tok)**

Pemkot Kediri Buka Pelatihan Kerja 2026, Siapkan Ratusan Warga Hadapi Tantangan Industri dan UMKM



KEDIRI, BN – Pemerintah Kota Kediri resmi membuka program Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro Tahun 2026 di Ruang Jayabaya, Balai Kota Kediri, Selasa (10/11/2026). Langkah strategis ini digagas melalui sinergi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) guna mencetak SDM berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha.

Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, M. Ferry Djatmiko, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa program ini dilatarbelakangi oleh mismatch atau ketidaksesuai kualifikasi antara kebutuhan dunia industri dengan keterampilan pencari kerja saat ini.

"Pencari kerja masih kesulitan mendapat pekerjaan, sementara perusahaan juga tidak mudah menemukan talenta yang sesuai. Pemkot Kediri hadir menjembatani tantangan ini. Keterampilan yang diasah di sini adalah investasi bagi warga agar kompeten dan siap dilirik oleh industri," ujar Ferry dalam sambutannya.

Pada periode ini, total peserta yang berpartisipasi mencapai 748 orang warga Kota Kediri. Dinkop UMTK memfasilitasi 366 pencari kerja dan 244 pelaku usaha mikro. Sementara itu, Disperdagin menaungi 138 peserta lainnya.

Ragam materi pelatihan dirancang agar adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pasar:

> Dinkop UMTK: Housekeeping, digital marketing, pengelasan, konten kreator, barista, serta manajemen usaha dan keuangan.

> Disperdagin: Desain visual, e-sport, Make-Up Artist (MUA), dan pembuatan makanan tradisional.

Ferry menegaskan bahwa pihak Pemkot akan terus mengevaluasi keberhasilan program. Ia juga memberi target nyata kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mitra agar sedikitnya 50 persen dari lulusan pelatihan dapat langsung terserap di industri atau berhasil membuka usaha mandiri demi menekan angka pengangguran lokal.

Dukungan senada disampaikan Wakil Wali Kota Kediri, KH. Qowimuddin, S.Pd.I. (Gus Qowim). Beliau menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor agar percepatan penyerapan tenaga kerja dan penguatan kelas UMKM terwujud.

"Ini wujud nyata Pemkot Kediri memajukan kualitas SDM dan UMKM kita. Kita ingin produk-produk UMKM lokal tidak hanya merajai pasar dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor sehingga perekonomian dan kesejahteraan warga terus meningkat," tutur Gus Qowim.

Acara pembukaan ini turut dihadiri oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Kediri, Asisten Administrasi Umum, jajaran Kepala OPD Pemkot Kediri, para pimpinan LPK penyelenggara, serta ratusan peserta pelatihan. **(Nyoto)**

Bupati Blitar Pimpin Apel Gabungan Persiapan Pengamanan Pilkades Serentak 2026

BLITAR, BN – Bupati Blitar, Rijanto memimpin apel gabungan dalam rangka pengamanan Pilkades Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2026, di Alun-alun Kanigoro, Senin pagi (16/11/2026).



Bupati Blitar saat memimpin Apel Gabungan Persiapan Pengamanan Pilkades Serentak 2026 di Alun-alun Kanigoro, Senin pagi (16/11/2026). **(sastro)**

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota Forkopimda; Saudara Komandan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yudha; Jajaran Tni, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Linmas dan Seluruh Lembaga Terkait Pilkades Serentak Tahun 2026; serta seluruh peserta apel yang hadir.

Bupati Blitar, Rijanto dalam sambutannya mengatakan," saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta apel atas kehadiran dan kesiapsiagaannya. ini merupakan wujud komitmen bersama dalam menyukseskan Pilkades Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2026 agar berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar bupati.

"Apel gelar pasukan ini merupakan tindak lanjut deklarasi damai pilkades dan penandatanganan pakta integritas pada tanggal 6 november 2026 lalu, sekaligus untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan," jelas Bupati Blitar Rijanto.

Lanjut Rijanto, "untuk itu saya berpesan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan mengedepankan pendekatan humanis. Hadapi setiap dinamika di lapangan dengan bijak, utamakan komunikasi, serta jangan mudah terpancing provokasi, dan sampaikan kepada seluruh masyarakat, mari kita jadikan pilkades sebagai sarana pendewasaan demokrasi. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, namun jangan sampai merusak persaudaraan dan kerukunan. Siapa pun yang nantinya terpilih, mari kita dukung bersama dan kembali bersatu membangun desa masing-masing," ujarnya.

"Ingat, keberhasilan Pilkades bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga persatuan dan kerukunan setelah proses pemilihan selesai," imbuhnya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, POLRI, SATPOL PP, LINMAS, penyelenggara pilkades, jajaran pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan pengabdiannya," ungkapnya.

"Tetap semangat, jaga soliditas dan kesehatan. semoga seluruh rangkaian pilkades serentak tahun 2026 berjalan aman, lancar, damai, dan menghasilkan pemimpin desa yang membawa kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Pilkades sukses, masyarakat guyub rukun, desa semakin maju, kabupaten blitar semakin berdaya dan berjaya," pungkas Bupati Blitar Rijanto. **(Sastro/Adv)**

Walikota Probolinggo Sambangi Dua Keluarga Berduka, Ini Bantuan yang Diserahkan



Wali Kota Probolinggo, Aminuddin saat mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah.

PROBOLINGGO, BN – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menyalurkan santunan kematian kepada dua keluarga ahli waris di Kelurahan Kedopok dan Kelurahan Jrebeng Lor, Kota Probolinggo, Provinsi JawaTimur, Senin (2/11/2026). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, saat mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa.

Dua keluarga penerima santunan tersebut merupakan ahli waris almarhum Hosin di Kelurahan Kedopok dan almarhum Muhammad Abdillah di Kelurahan JrebengLor. Aminuddin mengatakan santunan kematian merupakan salah satu program Pemkot Probolinggo yang diberikan kepada keluarga warga meninggal dunia sesuai dengan persyaratan dan klasifikasi penerima yang telah ditetapkan.

"Kota Probolinggo itu member santunan kematian sesuai dengan klasifikasi ataupun mereka yang berhak mendapat santunan. Maka saya secara langsung menyerahkan kepada masyarakat, selain saya silaturahmi," ujar Aminuddin.

Menurutnya, kunjungan langsung ke rumah duka juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di tengah keluarga yang mengalami musibah.

Aminuddin berharap pelayanan kepada masyarakat, termasuk pendampingan keluarga berduka, dapat melibatkan perangkat kewilayahan mulai dari tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), perlindungan masyarakat (Linmas), hingga kelurahan dan kecamatan.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini menguatkan peran dari RT, RW, Linmas, dan tentu lurah dan camat," ujarnya.

Sementara itu, Fathul, putra almarhum Hosin, mengatakan ayahnya semasa hidup bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah madrasah. Selain santunan kematian, keluarga almarhum Hosin juga akan menerima dokumen administrasi kependudukan berupa akta kematian dan kartu keluarga (KK) terbaru. "Akta kematian, iya, sama santunan," kata Fathul.

Dalam kunjungan berikutnya ke rumah keluarga almarhum Muhammad Abdillah di Kelurahan Jrebeng Lor, Aminuddin turut berbincang dengan ibu almarhum, Sukarlin, mengenai kondisi kesehatan dan pekerjaan putranya sebelum meninggal dunia. Sukarlin menuturkan bahwa putranya semasa hidup bekerja di bidang pemasangan perangkat audio kendaraan. "Bekerja masang audio di mobil itu," terangnya. **(SON)**

Ketua DPRD Blitar Supriadi Dukung Kegiatan Umat Hindu, Tekankan Pentingnya Kerukunan Jelang Pilkades

BLITAR, BN - Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan sekaligus menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Blitar. Ia juga membuka ruang komunikasi bagi seluruh elemen masyarakat demi menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif.



Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, saat menghadiri deklarasi damai Pilkades serentak tahun 2026. **(ist)**

Komitmen tersebut disampaikan Supriadi saat menerima audiensi pengurus umat Hindu di ruang Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana penyelenggaraan kegiatan lomba yang akan digelar oleh umat Hindu di Kabupaten Blitar.

Dalam kesempatan itu, Supriadi menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan menyatakan dukungan agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar serta memberikan hasil sesuai harapan penyelenggara.

"Kami dari DPRD mendukung kegiatan itu dan berharap bisa berjalan lancar serta meraih apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh mereka semua," ujar Supriadi yang akrab disapa Pak Kuat usai audiensi.

Menurutnya, dukungan terhadap kegiatan keagamaan merupakan bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang saling menghargai di tengah keberagaman. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi antarkelompok masyarakat perlu terus dijaga.

Tak hanya membahas rencana kegiatan, audiensi tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai kondisi sosial masyarakat, terutama pentingnya mempertahankan toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten Blitar.

Supriadi menilai, sikap saling menghormati dan komunikasi yang terbuka menjadi modal penting untuk menciptakan suasana daerah yang aman, damai, serta terhindar dari potensi gesekan sosial.

Terlebih, Kabupaten Blitar akan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut menjaga suasana tetap sejuk dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pilihan maupun kepentingan.

"Kami ingin Kabupaten Blitar tetap adem ayem, komunikasinya bagus, toleransinya juga bagus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tegasnya.

Melalui pertemuan tersebut, Supriadi berharap komunikasi antara DPRD dan berbagai kelompok masyarakat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, keberagaman yang ada di Kabupaten Blitar dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

(sastro)

Peduli Pengangguran, Polres Lumajang Gandeng Disnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Bisnis



LUMAJANG, BN – Upaya menekan angka pengangguran tidak hanya membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi juga keterampilan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Hal inilah yang dilakukan Polres Lumajang dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lumajang melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Melalui program tersebut, Polres Lumajang bersama Disnaker memberikan pembekalan teknis manajemen bisnis tingkat dasar kepada peserta penyandang disabilitas dari seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Disnaker Kabupaten Lumajang itu menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., dan Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang Subechan, S.E., M.M.

Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan, program Poliran merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran sekaligus upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Menurut kapolres, kepolisian tidak hanya memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang atas kerja sama dan kolaborasinya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana melalui program Polisi Peduli Pengangguran," ujar Riki.

Ia berharap, pembekalan keterampilan manajemen bisnis tingkat dasar tersebut dapat memberikan pengetahuan dan bekal bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri, termasuk membuka peluang usaha secara mandiri.

Riki juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program kolaborasi antara Polres Lumajang dan Disnaker. Dengan kegiatan serupa tidak hanya berhenti pada satu pelaksanaan, tetapi dapat terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu program penting yang dapat terus dilanjutkan. Sinergi antara Polres Lumajang, Dinas Tenaga Kerja, dan masyarakat harus terus dijaga agar program Polisi Peduli Pengangguran bisa memberikan manfaat nyata," terangnya.

Melalui program Poliran, Polres Lumajang berupaya mengambil bagian dalam mendukung peningkatan keterampilan masyarakat dan memperluas kesempatan kemandirian ekonomi, termasuk bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang.

(Son)

Milad ke-12 Yayasan Nur Rosyidah di Ponpes Baitul Qur'an Al Jahra Magetan Hadirkan Opick dan Dai Nasional



MAGETAN, BN - Puncak peringatan Milad ke-12 Yayasan Nur Rosyidah, Pondok Pesantren Baitul Qur'an Al Jahra Magetan, Jawa Timur, berlangsung meriah pada Sabtu malam (14/11), menjadi momentum dalam mempererat Silaturahmi dan sekaligus mensyukuri perjalanan 12 tahun dalam mengembangkan pendidikan Islam, yayasan dalam mengembangkan pendidikan Islam.

Kemeriahan yang ditampilkan para santri dengan berbagai kreatifitas berupa ; Kreasi seni, tarian, salawatan hingga kesenian Reog pun ada.

Suasana semakin meriah selain dengan penampilan Opick artis nasional dan ada pula Da'i Ustaz Mus jamil Hasbullah dengan penyampaian tausiyah dan pesan-pesan keagamaan kepada seluruh hadirin dalam puncak acara.

Gus Ivan Syafiudin, sebagai panitia Milad ke-12 mengatakan, bahwa rangkaian kegiatan malam puncak sengaja dikemas dengan berbagai penampilan untuk memberikan ruang kepada para santri dalam menunjukkan kreativitas, bakat, dan kemampuan mereka.

Menurutnya, kegiatan donasi pun tidak ketinggalan dalam peringatan tersebut sesuatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran dalam menimbulkan kepedulian sosial dan rasa kemanusiaan dengan sesama.

"Jumlah santri Pondok Pesantren Baitul Qur'an Al Jahra, mulai dari jenjang SMP hingga MA, mencapai sekitar 700 santri. Dengan jumlah tersebut merupakan gambaran perkembangan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Nur Rosyidah dan menjalankan dan mengembangkan pendidikan dan pembinaan generasi muda berbasis nilai-nilai Al-Qur'an," ucap Gus Ivan Syafiudin.

Lanjut Gus Ivan, melalui peringatan Milad ke-12 ini, keluarga besar Yayasan Nur Rosyidah bertekad, Pondok Pesantren Baitul Qur'an Al Jahra semakin maju dan berkembang serta terus berkomitmen mencetak generasi Qur'ani yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Akhir kata dari nya, Milad ke-12 bukan sekadar perayaan bertambahnya usia, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menanamkan nilai kepedulian dan kebersamaan kepada seluruh santri.

Selamat Milad ke-12 Yayasan Nur Rosyidah. Semoga Pondok Pesantren Baitul Qur'an Al Jahra semakin berkah, maju, dan istiqamah dalam mencetak generasi Qur'ani.

(Ashar)

Walikota Probolinggo Beri Lampu Hijau Pasar Gotong Royong Bisa Jadi Hotel



Deretan ruko di kawasan Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo.

PROBOLINGGO, BN - Dorongan DPRD Kota Probolinggo mengubah Pasar Gotong Royong menjadi hotel diamini Wali Kota dr. Aminuddin. Bahkan, ia membuka lebar-lebar bagi investor yang hendak menjadikan pasar daerah itu sebagai hotel.

Aminuddin mengata-

■ **Bersambung ke hal.11 kol.5**

SDN Cijeler 1 Dan Cijeler 2 Situraja Digelontor Bantuan Revitalisasi APBN Milliaran



Pekerja sedang ngebut merehab ruang gedung SDN Cijeler 1 dan Cijeler 2 Situraja. **(Ernawan)**

SUMEDANG, BN - SDN Cijelet 1 dan Cijeler 2 di desa Cijeler kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, resmi menerima bantuan Program Revitalisasi satuan pendidikan TA 2026 senilai 1.258.992.905, Cijeler 1 dan 1.306.161.174, Cijeler 2 dari APBN melalui kemendikdasmen Bantuan ini dialokasi untuk memperbaiki kondisi gedung sekolah yang sebelumnya mulai lapuk di makan usia.

Kepala SDN Cijeler Tuti Kusniawati, S.Pd menyampaikan rasa syukur atas realisasi bantuan yang telah diperjuangkan sekian lama melalui pemukhiran data Dapodik "Alhamdulilah bantuan ini sangat berarti untuk memperbaiki gedung yang kurang layak sehingga kegiatan belajar mengajar kedepan bisa jauh lebih aman dan nyaman," tutur Tuti.

Pengerjaan proyek dilakukan secara swakelola oleh panitia (P2SP) di bawah tanggung jawab Asep dengan target penyelesaian selama maksimal sampai 31 desember

Pihak sekolah berharap ke depan pemerintah dapat terus mengucurkan dukungan anggaran lanjutan untuk melengkapi sarana penunjang lain yang belum tersedia di sekolah.

(Ernawan)

SDN Wado Terapkan Bantuan Dana Revitalisasi



Rehab SDN Wado tampak sedang dikebut. **(ernawan)**

SUMEDANG, BN - Kepala SDN Wado Abdul Majid,S.Pd di hadapan Komite Sekolah mengatakan, kami mendapat bantuan dari Kementrian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merehab Ruang kelas 10 lokal, Rehab Toilet satu unit dan penataan halaman yang semuanya dianggarkan dari dana APBN sebesar Rp.1.595.695.142,-

Pekerjaan ini kami mengerjakan secara Swakelola yang tersusun sebagai kepanitiaan adalah PPSP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) secara hirarki kamilah selaku Kepala Sekolah merupakan Tanggung Jawab semua kegiatan paparnya.

Pekerjaan akan dikerjakan selama 84 hari kalender terhitung mulai tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 30 Desember 2026. Ditambahkan Abdul Majid kami selaku penanggung jawab kegiatan Revitalisasi ini mengingat bahwa pekerjaan pisik memang secara formal dikerjakan oleh PPSP namun disisi lain ada pekerjaan teknisi yang harus dikerjakan oleh ahlinya, "Untuk ini kami menyampaikan disini bahwa betul ada pekerjaan yang harus kerjasama dengan pihak ahli teknisi sehingga kami bekerjasamalah dengan mereka untuk menuntaskan pekerjaan ini," paparnya. **(ernawan)**

SDN Cicarimanah Direhab dengan Dana APBN Tahun 2026



SUMEDANG, BN - Dengan anggaran 1.38.577.648,00 SDN Cicarimanah direhab. Menurut Cece Wawan selaku PPSP dihadapan Kepala Sekolah Mulyadij, S.Pd menjelaskan, bahwa penerimaan sejumlah itu akan dialokasikan kepada pekerjaan rehab ruang kelas 6 lokal, rehab ruang Perpustakaan, rehab Ruang guru dan ruang administrasi, Pembuatan Toilet satu paket dan penataan halaman sekolah.

Harapan ke depan menurut Mulyadi dan Cece Wawan setelah adanya perbaikan sarana ini mudah mudahan berdampak positif ada peningkatan baik kepada para pengajar maupun siswa.

Ditambahkan Cece, "Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan atas terkucurnya program Revitalisasi ini kami menyimpulkan, pihak Pemerintah telah memperhatikan Keadaan SDN Cicarimanah dan mudah mudahan pula pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dan lancar tidak ada masalah," paparnya. **(ernawan)**

Kelompok Tani Malati dan Sadarmanah Terima Bantuan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier



SUMEDANG, BN - Pihak Pemerintah melalui Kementrian Pertanian tengah mengucurkan dana kepada beberapa Kelompok Tani untuk biaya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier di Kecamatan Rancakalong, hampir dalam waktu yang bersamaan ada dua kelompok Tani di Desa Sukasirnarasa dan di Desa Nagarawangi.

Di Desa Sukasirnarasa dana bantuan tersebut terkucur kepada Kelompok Tani Malati dengan anggaran sebesar Rp 100 Juta rupiah dan kepada Kelompok Tani Sadarmanah yang berlokasi di Desa Nagarawangi di Dusun Cijere juga mendapat bantuan dana sama 100 juta rupiah. Kelompok Tani Malati dipimpin Oleh Endang,Sekretaris Tamrin dan Bendahara dipegang oleh E.Tarya.

Endang saat dikonfirmasi di lapangan dihadapan Tamrin dan E.Tarya mengatakan bahwa kami telah menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua anggota dan RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana, yaitu mengerjakan pekerjaan di Blok Cicuka yang manfaatnya nanti bisa turun temurun ke anak cucu kami.

Untuk Kelompok Tani Sadarmanah yang dipimpin Oleh Ketua Kelompok Ating berlokasi di Dusun Cijere mengerjakan pekerjaan sepanjang 129 meter yang manfaatnya bisa mengairi areal Sawah kurang lebih 25 Hektaran Sawah untuk ini kami mewakili semua anggota mengucapkan Syukur Alhamdulillah Program Pemerintah bisa terkucur di Tahun ini dan sebenarnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah melalui Kementerian Pertanian atas dorongan semua pihak terkait pekerjaan Irigasi ini bisa berjalan dengan mulus serta tidak ada hambatan lancar, tegasnya.

Kami dari Kelompok Tani Sadarmanah mengharap mudah mudahan di Tahun depan Program ini bisa berkelanjutan karena masih ada areal Sawah yang membutuhkan saluran Irigasi kurang lebih ada 2500 meter lagi yang perlu bantuan saluran Irigasi tersier. **(Ernawan)**

Ruang Kelas SDN Karangpawulang Direhab



Tampak tumpukan material untuk rehab ruang kelas SDN Karangpawulang.

SUMEDANG, BN - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Cq.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengucurkan Dana APBN untuk Program Revitalisasi satuan Pendidikan tahun 2026. Saat dikonfirmasi Akbar Pitriono,S. Pd selaku Ketua PPSP dihadapan Kepala Sekolah Yayat Nuryati,S.Pd menjelaskan, kami telah menerima dana bantuan Pemerintah sebesar Rp 2.008.057.674,-

Yayat memaparkan, anggaran sejumlah itu akan dipergunakan untuk Rehab ruang kelas 5 lokal, Rehab Ruang Administrasi 1 lokal, Ruang Perpustakaan 1 unit, RKB.4 lokal WC, Bikin baru 2 unit rehab 4 unit dan penataan halaman.

Ucapan terima kasih dari Kepala sekolah dihadapan Ketua PPSP dan para tenaga pengajar yang lainnya kepada pihak Pemerintah yang telah mengucurkan dana APBN mudah mudahan lancar.

Pekerjaan dikerjakan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Harapan kedepan dari Kepala Sekolah mudah mudahan dengan adanya perbaikan sarana ini berdampak positip baik kepada semua tenaga pendidik maupun para siswa siswi yang berada di SDN Karangpawulang semuanya bisa ada peningkatan. **(Ernawan)**

Wabup Asahan Lepas Tim Paskibra Jaguar dan ADC TVRI SD Al-Washliyah



ASAHAN, BN - Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H.,M.A.P melepas keberangkatan Tim Paskibra Jaguar dan peserta Akademi Dai Cilik (ADC) TVRI dari SD Al-Washliyah 80 Kisaran. Pelepasan dilakukan di Halaman Kantor Bupati Asahan, Jalan Jenderal Sudirman Kota Kisaran, Rabu (11/11/26) pagi.

Turut hadir dalam acara, mewakili Kapolres Asahan, mewakili Dandim 0208/Asahan, mewakili Danlanal TBA, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati, OPD, Kepala Sekolah dan guru SD Al-Washliyah 80 Kisaran dan orang tua peserta.

KepalaSDAl-Washliyah 80 Kisaran,Salbiah Manurung dalam laporannya mengucapkan terimakasih kepada Wakil Bupati Asahan atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada para peserta didiknya.

Ia menerangkan, Tim Paskibra Jaguar akan mengikuti lomba tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di MAN Percontohan Martubung pada 12-14 November 2026.

Sementara peserta Akademi Dai Cilik (ADC) TVRI akan mengikuti babak semifinal pada 15 November 2026 di Stasiun TVRI.

Ia mengaku bangga dan terharu karena para peserta mendapat kesempatan dilepas langsung oleh Wakil Bupati Asahan dan berharap dukungan tersebut menjadi motivasi bagi anak-anak untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa prestasi bagi Kabupaten Asahan.

Diakhir laporannya, ia juga memohon doa dan dukungan masyarakat Asahan agar kedua tim meraih hasil membanggakan.

Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, MAP, dalam amanatnya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan sangat mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat mengembangkan potensi, bakat, dan prestasi generasi muda. **(TP)**

SMPN 1 Congeang Dapat Bantuan Revitalisasi Rp 677 Juta



SUMEDANG, BN - SMPN 1 Cogeang kecamatan Cogeang kabupaten Sumedang tengah, melaksanakan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2026

Program tersebut mencakup pembangunan perbaikan 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru (RKB)yang saat ini tengah dalam. Proses pengerjaan Pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi para siswa.

Kepala SMP N 1 Cogeang Adang Rohendi S.P.d mengatakan pihak sekolah menyambut baik program revitalisasi yang diberikan pemerintah tersebut .

Bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan ini kami terima untuk.meningkatkan kualitas intrastruktur sekolah agar proses belajar mengajar bisa lebih nyaman dan layak. Proyek revitalisasi memiliki nilai bantuan sebesar Rp 667.760.000 dan pelaksanaannya di percayakan kepada panitia pembagunan satuan pendidikan (P2SP)

Berdasarkan informasi kegiatan pekerjaan di mulai pada tanggal 2 November 2026 dan ditargetkan selesai pada tanggal 16 Januari 2027 P2SP pastikan pembangunan sesuai ketentuan. P2SP SMP N 1 Cogeang mengatakan, pihaknya berkomitmen melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pembangunan agar berjalan sesuai spesifikasi teknis dan target waktu yang telah ditentukan.

Aspek keselamatan kerja menjadi salah satu perhatian dalam.pelaksanaan pembagunan di lokasi proyek juga telah terpasamg papan informasi yang menegaskan kawasam tersebut sebagai areal keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Para pekerja di wajibkan menggunakan pelengkap keselamatan kerja antara lain helm, rompi, sepatu dan sarung tangan selama melaksanakan pekerjaan. Program revitalisasi tersebut berada di bawah supervisi kementrian pendidikan. Diharapkan dengan adanya perbaikan ruang kelas dapat meningkatkan belajar mengajar dan pihak sekolah berharap pembagunan ruang kelas dapat diselasaikan sesuai jadwal dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Dengan tersedianya fasilitas ruangan kelas yang lebih baik, proses kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung lebih optimal sekaligus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan aman, nyaman dan layak bagi seluruh peserta didik.

Pihak sekolah bersama P2SP juga dapat di harapkan terus melakukan pengawasan selama proses pembagunan berlangsung sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan program revitalisasi satuan pendidikan. **(Ernawan)**

Perbaikan Saluran Sier BBWS Citanduy Satker SDA OP 2 Maksimalkan Suplai Air ke Sawah



Saluran Sier di Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang telah diperbaiki.

CILACAP, BN – Program perbaikan saluran irigasi Sier di wilayah Jalan Tanpa Nama, Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang dilaksanakan melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Satker SDA OP 2, diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi air ke lahan persawahan masyarakat.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (10/10/2026), terlihat bagian saluran beton yang telah diperbaiki. Perbaikan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan kebocoran dan hambatan aliran air yang berpotensi mengganggu kebutuhan irigasi para petani.

Keberadaan saluran irigasi yang berfungsi dengan baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian, khususnya untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan persawahan. Oleh karena itu, hasil pekerjaan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan.

PPK SDA OP 2 BBWS Citanduy, Yahya, diharapkan terus menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, gambar perencanaan, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan juga menjadi bagian penting agar saluran dapat berfungsi secara optimal dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan. **(Asep)**

BLK Kediri Gelar Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2026





Kegiatan Pelatihan Menjahit Pakaian Dengan Mesin untuk warga Desa Udanawu, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Tampak peserta sangat senang dan antusias mengikuti pelatihan. **(pri)**

KEDIRI, BN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur melalui UPT Balai Latihan Kediri (BLK) Kediri melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk warga Desa Udanawu, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.

Kegiatan Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan Mesin dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kantor MWCNU Desa Udanawu Kabupaten Blitar, Rabu (4/11/2026). Sebanyak 16 peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari warga Udanawu.

Pelatihan dimulai 26 Oktober hingga November 2026 selama 260 jam pelajaran atau 33, jadwal pelatihan hari Senen-Sabtu pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Suhermin selaku Instruktur Pelatihan Menjahit Pakaian BLK Kediri menyampaikan, untuk pelatihan menjahit pakaian dengan mesin materi yang diberikan mulai membuat pola rok, blouse, lengan dan gamis. Dilanjutkan praktek membuat polanya dengan skala dan pola dengan ukuran sebenarnya.

"Untuk hari ini, praktek mulai membuat rok dengan ukuran sebenarnya. Mulai memotong bahan dan menjahit rok. Dilanjutkan langkah menjahit ban pinggang dan tahap akhir pengesuman (jahit tangan) rok untuk memberikan tampilan yang rapi dan terlihat bagus pada pakaian," ucap Hermin.

Menurut Hermin untuk peserta pelatihan menjahit kendala yang dialami, dikarenakan masih pemula dan masih penyesuaian. "Selama pelatihan menjahit seluruh peserta mendapatkan bahan kain dan mesin jahit yang sudah disiapkan pihak BLK Kediri tanpa dipungut biaya alias gratis," tutur Hermin.

Peserta setelah mengikuti pelatihan akan mengikuti uji kompetensi jika dinyatakan lolos akan mendapatkan sertifikat BLK dan BNSP.

Hermin juga menambahkan untuk materi yang diujikan belum tahu. Namun, pihaknya sudah memberikan bekal yang cukup untuk membuat pola rok, kemeja, gamis dan celana kepada peserta. "Kami sangat berharap dengan ilmu ketrampilan yang didapatkan dari BLK Kediri bisa bermanfaat dan menambah penghasilan keluarga," harap Hermin.

Sementara, salah satu peserta Musalamah asal Karang Gondang Kecamatan Udanawu mengatakan, yang mendorong ikut menjahit ingin memiliki keahlian menjahit. Dengan kondisi saat itu mencari pekerjaan itu sangat sulit.

"Apalagi seorang ibu rumah tangga kalau kerja di pabrik juga sulit harus meninggalkan keluarga, tapi dengan keahlian menjahit yang dimiliki peserta bisa bekerja di rumah dan menambah income," ungkapnya.

(adv/pri)

Cetak Wirausaha Mandiri, BLK Kediri Gelar Pelatihan Menjahit Pakaian dengan Mesin di Desa Ngino Plemahan





Kegiatan Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian di Pondok Pesantren Nurul Hakim Dusun Kaliawen, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Kamis (5/11/2026). Tampak para peserta sangat antusias dan senang hati mengikuti pelatihan. **(pri)**

KEDIRI, BN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur melalui UPT Balai Latihan Kediri (BLK) Kediri melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Menjahit Pakaian dengan Mesin.

Kegiatan Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Hakim Dusun Kaliawen Desa Ngino Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Kamis (5/11/2026). Diikuti sebanyak 16 peserta berasal dari warga Desa setempat.

Pelatihan dimulai 26 Oktober hingga November 2026 selama 26 hari atau 260 jam pelajaran, pelatihan hari Senen-Sabtu pukul 08.00 WIB sampai 14.30 WIB.

Lasmi selaku Instruktur Pelatihan Menjahit dengan Mesin menyampaikan, Alhamdulillah antusias peserta pelatihan sangat bagus, semangat dan kemauan belajar sangat tinggi ketika memasuki hari ke-9, mulai praktek rok dan hari ini praktek gamis.

"Salah satu upaya mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi peserta bisa mengerjakan ujian dengan hasil yang baik, maka dilakukan pra assesment pelatihan membuat blouse. Ketika nanti menghadapi uji kompetensi peserta sudah siap dan mengerjakan dengan lancar, " ucap Lasmi yang juga pimpinan LPK HANLOG Collection.

Lasmi menambahkan, untuk peserta yang mengikuti pelatihan ini mendapatkan fasilitas sarana prasarana selama belajar menjahit dengan mesin dari BLK Kediri. "Peserta tidak dipungut biaya alias GRATIS, " tutur Lasmi.

Lanjut Lasmi setelah pelatihan ini para peserta yang juga anggota pengajian pondok pesantren Nurul Hakim dengan ilmu ketrampilan yang dimiliki nanti bisa mandiri untuk wirausaha dengan skill yang dimiliki harus bisa dikembangkan.

"Semoga dengan skill yang kita berikan ini selama pelatihan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi peserta dan warga santri serta masyarakat sekitarnya, " ungkapnya.

Sementara, salah satu peserta bernama Diana Septian (24) warga Desa Ngino Kecamatan Plemahan mengatakan yang mendorong ikut pelatihan menjahit ingin menambah ketrampilan dan meningkatkan perekonomian keluarga.

"Kedepannya kalau sudah punya ketrampilan menjahit paling tidak bisa mandiri dan berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, " ungkapnya. **(adv/pri)**

Kominfo Kabupaten Blitar Gelar Community Ghatering Bersama Awak Media Se Blitar Raya



Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono saat memberi sambutan kepada Awak Media yang mengikuti Community Ghatering. **(sastro)**

BLITAR , BN – Dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pers, Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kabupaten Blitar menggelar acara Community Gathering bersama awak Media SE Blitar Raya Selasa, (10/11/2026).

Dengan adanya kegiatan yang digelar di angkringan Joko Minggirsari Kabupaten Blitar, dihadiri Kepala Dinas Kominfo Agung Cahyono Berama Awak media SE Blitar Raya hadir dalam acara tersebut.

Acara ini menjadi salah satu upaya perkuat komunikasi, serta membangun kemitraan, dan kerjasama antara Pemerintah Daerah untuk media dalam menyampaikan berita informasi kepada Masyarakat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono menyampaikan kepada Awak Media, bahwa acara tersebut diselenggarakan untuk menjalin sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Media di wilayah Blitar Raya.

Keberadaan Media memiliki peran penting didalam menyampaikan Informasi perkembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. "Dengan ini kami dari Kominfo menggelar acara Community Gathering untuk menjalin sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Media, untuk hubungan kemitraan serta kerjasama yang selama ini sudah semakin baik, " ujar Agung.

Agung juga menyampaikan dalam waktu dekat Kabupaten Blitar akan melaksanakan Pilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak Tahun 2026 sebanyak 30 Desa di Wilayah Kabupaten Blitar.

Ia berharap Media dapat ikut membatu swasana yang Kondusif selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkades serentak berlangsung.

"Kami mengajak seluruh Media Blitar Raya untuk bersama memberikan pemberitaan yang baik, juga menyampaikan informasi yang positif, serta menonjolkan berbagai keunggulan juga yang berpotensi di Kabupaten Blitar," jelasnya.

Pihaknya mengajak awak media terus menjaga komunikasi juga membangun hubungan kerjasama yang baik. "Kami berharap kemitraan kerjasama ini mari kita menjalin lebih baik dengan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan Media membangun Kabupaten Blitar Berjaya," tutup Agung.

(Budi Sastro/ADV)

Demi Informasi Pembangunan Lebih Luas, DPRD Kab Blitar Dorong Belanja Media Rp 1,5 Miliar



Hearing antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya dan DPRD Kabupaten Blitar di ruang Komisi III, Selasa (27/10/2026).

BLITAR, BN –Anggaran belanja media Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang sebelumnya lebih dari Rp1 miliar kini disebut hanya tersisa sekitar Rp 400 juta. Kondisi ini menjadi perhatian dalam hearing antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya dan DPRD Kabupaten Blitar di ruang Komisi III, Selasa (27/10/2026).

Penurunan anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, dan hasil pembangunan kepada masyarakat. Di sisi lain, akses terhadap informasi pembangunan menjadi bagian penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Hearing tersebut melibatkan SMSI Blitar Raya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfotik), Bappedalitbang, BadanAnggaran (Banggar) DPRD, anggotaKomisi III, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan itu, muncul dorongan agar anggaran belanja media pada 2027 ditingkatkan menjadi Rp1,5 miliar. Usulan tersebut dinilai lebih ideal untuk mengakomodasi kebutuhan sekitar 122 perusahaan media yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) Kominfo.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, yang juga merupakan anggota Banggar DPRD, menyatakan pihaknya akan mengupayakan penambahan anggaran tersebut bersama jajaran eksekutif.

"Ini keprihatinan kita bersama. Namun, pada tahun depan akan kami upayakan bersama jajaran eksekutif. Angka Rp1,5 miliar sangat ideal bagi belanja media untuk 122 media di Pokja Kominfo," kata Sugianto.

Dorongan penambahan anggaran ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan kebutuhan belanja media untuk tahun anggaran 2027. Dukungan anggaran yang memadai diharapkan dapat menunjang penebar luasan informasi mengenai kebijakan dan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Meski demikian, upaya peningkatan anggaran tersebut masih perlu diperjuangkan melalui pembahasan bersama antara legislative dan eksekutif dalam proses penyusunan anggaran daerah.

(Sastro/Adv)

Bupati Parosil Tegaskan Pahlawan Masa Kini Adalah Mereka yang Mengisi Kemerdekaan



Parosil saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di SD Negeri 1 Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Sabtu (14/11/2026).



Bupati Parosil saat menyalami warga peserta upacara hari Pahlawan.



Bupati Parosil saat member sambutan.
-

LAMPUNG BARAT, BN – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan bahwa makna pahlawan telah mengalami pergeseran. Jika dahulu pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, kini pahlawan adalah mereka yang berkonstribusi mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian.

Hal tersebut disampaikan Parosil saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan di SD Negeri 1 Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, guru yang berjuang mencerdaskan generasi bangsa serta masyarakat yang menjaga kelestarian lingkungan merupakan pahlawan masa kini. "Pahlawan hari ini adalah guru yang berjuang mewujudkan pendidikan berkualitas, bermutu dan berprestasi. Pahlawan juga mereka yang mencintai dan menjaga lingkungan," ujar Parosil.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, kesehatan, kebersihan, dan lingkungan sekolah, terlebih SD Negeri 1 Sukapura merupakan sekolah Adiwiyata menuju mandiri. Kehadirannya sekaligus untuk memastikan kesiapan sekolah dalam memenuhi seluruh persyaratan menuju predikat tersebut.

Parosil menegaskan, semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui niat tulus, kerja nyata, dan tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing demi kemajuan daerah dan bangsa. **(Adv/ Taufik)**

Wakil Bupati Mad Hasnurin Lepas 291 Atlit Lambar, Berlaga di Porprov X Lampung







Berbagai moment Wabup Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, saat mengukuhkan dan melepas Kontingen Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung Tahun 2026. **(taufik)**

LAMPUNG BARAT, BN - Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, secara resmi mengukuhkan dan melepas Kontingen Kabupaten Lampung Barat untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung Tahun 2026. Pengukuhan dilakukan pada kegiatan Apel Pagi yang digelar di Lapangan Pemda Kabupaten Lampung Barat, Senin, (16/11/2026).

Pada Porprov X kali ini, Kabupaten Lampung Barat mengirimkan kontingen sebanyak 291 atlet. Mereka akan bertanding pada 21 cabang olahraga, dalam 272 nomor pertandingan. Ajang olahraga tingkat provinsi ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 28 November 2026 di Kota Bandar Lampung.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KONI Lampung Barat. Ia menilai, persiapan yang matang menjadi modal penting bagi kontingen untuk tampil optimal di Bandar Lampung.

Wabup Mad Hasnurin mengingatkan bahwa para atlet tidak hanya bertanding atas nama diri sendiri atau cabang olahraga masing-masing, tetapi juga membawa nama baik dan kehormatan Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, lanjut Mad Hasnurin, berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan bidang olahraga. Ia berharap semakin banyak atlet potensial dari Lampung Barat yang mampu berprestasi, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. "Selamat bertanding! Tunjukkan bahwa Lampung Barat mampu berprestasi!" ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Koni Lampung Barat, Muhammad Irfan Mabsus, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab Lampung Barat.

"Ungkapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas dukungan dan apresiasi kepada Koni kabupaten Lampung Barat," ungkap Irfan. **(Adv/ Taufik)**

DPRD Pamekasan Gelar Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Pamekasan Ke-496 Tahun 2026



Rapat paripurna DPRD Pamekasan dalam rangka Peringatan Hari Jadi Pamekasan Ke-496 Tahun 2026. **(ist)**

PAMEKASAN, BN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Pamekasan ke-496 tahun 2026 dengan tema "Pamekasan Bangkit " yang bertempat di aula pertemuan gedung DRPD Pamekasan, Selasa 3/11/2026.

Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD pamekasan Ali Masykur yang di hadiri 45 anggota. Nampak hadir pula bupati pamekasan Dr Kholilurrahman, SH, Msi dan wakil bupati Pamekasan H.Sukriyanto, Sekda Pamekasan Drs Taufikurrahman, Msi, Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat S.I.K, MH, Dandim 0826 Pamekasan Letkol Kav.Agus Wibowo Hendratmoko SH, M.Han, Kajari Pamekasan, ketua Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan serta seluruh pejabat pimpinan OPD dan camat se-kabupaten Pamekasan.

Dalam pidatonya ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan momentum peringatan hari jadi Pamekasan merupakan perayaan agenda tahunan yang di laksanakan setiap tahun, sehingga dengan momentum tersebut pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat mensyukuri atas lahirnya kabupaten Pamekasan yang tercintai. Selain itu, pihaknya sangat mengapresiasi atas diraihnya beberapa penghargaan yang dicapai oleh kabupaten Pamekasan."Saya menapresiasi atas capaian penghargaan yang telah di raih oleh pemerintah kabupaten Pamekasan selama ini," ungkapnya.

Sementara menurut bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman, SH, Msi, menyampaikan momentum peringatan hari jadi Pamekasan yang ke-496 tahun 2026 untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan di sambut dengan penuh rasa bahagia. Oleh karena itu, dengan peringatan kali ini menjadi pondasi untuk mengevaluasi diri kita masing-masing dalam tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. "Momentum peringatan hari jadi Pamekasan ini, mari kita saling bahu-membahu dan saling berkolaborasi untuk membangun kabupaten Pamekasan ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

(kholis)

Kemilau Madura, Puncak Peringatan Hari Jadi Pamekasan Ke-496 Tahun 2026



Bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman, SH,Msi, memukul gong dalam acara puncak Puncak Peringatan Hari Jadi Pamekasan Ke-496 Tahun 2026 di area Monumen Arek Lancor, Senin malam (2/11/2026).

PAMEKASAN, BN - Pemerintah kabupaten Pamekasan menggelar kegiatan Kemilau Madura yang merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Jadi (Harjad) kabupaten Pamekasan yang ke-496 tahun 2026 yang digelar di area Monumen Arek Lancor, Senin malam (2/11/2026).

Momentum Hari Jadi Pamekasan Ke- 496 tersebut mengusung tema "Pamekasan Bangkit" menjadi ruang refleksi untuk memperkuat identitas budaya dan persatuan masyarakat.

Dalam sambutannya bupati Pamekasan Dr Kholilurrahman, SH,Msi, menekankan pentingnya menjaga identitas budaya Madura di tengah perubahan zaman, globalisasi dan perkembangan kehidupan masyarakat. Ia menyampaikan perubahan merupakan bagian dari dinamika kehidupan, namun identitas budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur harus tetap di pertahankan.

"Ditengah semua perubahan tersebut kita memiliki identitas diri,identitas ini tidak boleh hilang, yakni bahasa Madura tidak boleh hilang," ungkapnya.

Kholili juga meminta agar penggunaan bahasa Madura kembali diperkuat di lingkungan pemerintah dan pendidikan.Ia mengaku telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Pamekasan untuk menetapkan satu hari dalam sepekan menggunakan bahasa Madura. "Kita harapkan anak-anak kita jangan sampai melupakan bahasa Madura," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran dunia pendidikan dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah, sebab dinas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya dan bahasa Madura kepada generasi muda. "Di arus globalisasi dan modernisasi berpotensi menggerus kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah,apabila tidak di imbangi dengan penguatan nilai-nilai budaya sejak dini," ucapnya.

Menurutnya peringatan hari jadi Pamekasan yang ke-496 tahun 2026 bukan sekedar acara seremonial, agenda tahunan dan perayaan saja, akan tetapi momentum itu harus memiliki makna penting dalam memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. "Perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup bersama, melainkan kekayaan uang harus kita rawat sebagai kekuatan persatuan dan kebersamaan," pungkasnya. **(kholis)**

Bupati Ing Iskandarsyah Siap Jadikan Karimun Pusat Peradaban Melayu

KARIMUN, BN - Bupati Karimun, Ing. Iskandarsyah, menyambut hangat pengesahan Resolusi Dialog Selatan VI sekaligus mempersembahkan pembacaan puisi tentang kebangkitan Bumi Berazam pada malam puncak silaturahmi sastra serumpun di Halaman Rumah Dinas Bupati Karimun, Sabtu malam, 14-11-2026. Momentum ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menjadikan daerah di gerbang Selat Malaka tersebut sebagai pusat gravitasi baru kemajuan peradaban Melayu.



Pertemuan akbar yang mempertemukan para pemikir, budayawan, akademisi, serta sastrawan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Thailand Selatan ini mengangkat tema besar "Menimbang Karimun sebagai Titik Tolak Kemajuan Kemelayuan di Zaman Kecerdasan Artifisial".

Dalam sambutannya, Ing. H. Iskandarsyah mengungkapkan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Karimun sebagai tuan rumah penyelenggaraan Dialog Selatan keenam.

"Kami merasa bangga dan berbahagia Dialog Selatan yang ke-6 bisa diadakan di Kabupaten Karimun yang kita cintai. Sebuah kehormatan bagi kami tuan-tuan dan puan-puan dari negeri seberang maupun berbagai daerah di tanah air bisa hadir di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendatangkan keberkahan dan menjadi pintu rezeki bagi kita semua," ujar Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah.

Suasana malam puncak di Halaman Rumah Dinas Bupati semakin semarak ketika Ing. H. Iskandarsyah menutup pidatonya dengan untaian pantun Melayu dan pembacaan puisi. Di hadapan Gabungan Penulis Nasional Malaysia Dato' Prof. Zainal Abidin, Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, tokoh sastra Kepulauan Riau Dato' Husnizar Hood, serta para tamu undangan, ia melantunkan puisi yang menggambarkan tekad Bumi Berazam untuk bangkit, melaju tanpa ragu, dan menyala terang laksana mercusuar baru kemakmuran bangsa. Ia juga mengungkapkan bahwa karya puisi tersebut disusun secara mandiri.

Selain pembacaan puisi, agenda utama malam tersebut ditandai dengan penyerahan lima butir Resolusi Dialog Selatan VI kepada Bupati Karimun sebagai pijakan strategis penguatan budaya Melayu di era disrupsi teknologi:

- Perumusan Cetak Biru Pembangunan: Mendorong Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan di kawasan Selat Malaka untuk merumuskan cetak biru pembangunan yang menempatkan Karimun sebagai simpul penghubung integrasi pelestarian warisan budaya Melayu dan ekosistem teknologi digital, sekaligus membangun pusat kebudayaan modern.

- Penguatan Kerja Sama Serantau: Mempertingkat kolaborasi program bahasa, seni, dan budaya antarpenulis serta organisasi sastra serantau melalui penyelenggaraan festival kebudayaan, seminar sejarah, dan penerbitan karya Melayu.

- Kaderisasi Penulis Muda: Memperluas pelibatan penulis muda dalam kepemimpinan serta inovasi digital sastra guna menjamin kelangsungan warisan kemelayuan di era modern.

- Konsorsium Lintas Disiplin dan Lintas Batas: Menyepakati pembentukan forum atau konsorsium di kawasan Dialog Selatan yang mempertemukan budayawan dengan ilmuwan data, insinyur kecerdasan artifisial, dan pelaku industri kreatif untuk melahirkan proyek kolaboratif yang konkret.

- Penerbitan Antologi Tematik: Menerbitkan sekurang-kurangnya satu antologi puisi atau karya sastra khusus bertemakan masa depan kemelayuan dan kecerdasan buatan oleh pihak tuan rumah pada setiap penyelenggaraan Dialog Selatan.

Menutup rangkaian penyampaiannya, Bupati Ing. H. Iskandarsyah turut mengumumkan secara resmi bahwa estafet tuan rumah penyelenggaraan Dialog Selatan VII mendatang akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

(Joy)

Hujan Turun, Perumda Air Minum Waemanurung Optimis Pelayanan Pelanggan Akan Terpenuhi



Direktur Perumda Air Minum Wae Manurung, Muh Bachtiar Sairing, S.Sos. **(edys)**

BONE, BN – Hujan sudah mulai turun walaupun belum keras namun Perumda Air Minum Wae Manurung atau PDAM Bone tetap fokus perbaikan instalasi di wilayah perkotaan melihat kondisi pipa saluran air sudah banyak yang karatan dan mengalami kebocoran akibat sudah tua.

Direktur Perumda Air Minum Wae Manurung, Muh Bachtiar Sairing, S.Sos tetap optimis untuk pelayanan pelanggan sekalipun kondisi kemarau panjang namun sedikit kendala kurang nya air tapi tetap kebutuhan pelayanan pelanggan tetap perioritas.

Apalagi kondisi kemarau panjang saat ini sehingga debit air air baku kurang lancar namun masih cukup untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat perkotaan. "Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat perkotaan, kami mengandalkan beberapa sumber air baku utamanya Wollangi," ujarnya.

Selain menjaga debit air, Perumda juga bergerak cepat menangani berbagai gangguan teknis di lapangan, termasuk kebocoran pipa yang berpotensi mengganggu distribusi air ke pelanggan.

Perumda Wae Manurung juga menilai kebutuhan air bersih di Kabupaten Bone terus meningkat sehingga diperlukan tambahan sumber air baku baru untuk jangka panjang.

"Penambahan sumber air baku menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini kami terus mengupayakan berbagai langkah, termasuk menggagas kerja sama dengan pihak swasta untuk pembangunan sistem jaringan baru air bersih" katanya.

Perumda berharap adanya dukungan semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan sumber air demi memastikan pasokan air bersih masyarakat tetap aman. **(Edys)**

Sat Lantas Polres Binjai :

Pelayanan SIM Sesuai SOP dan Zero Tolerance Pungli



Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Sat Lantas Polres Binjai. **(ist) '**

BINJAI, BN - Kasatlantas Polres Binjai, AKP Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., membantah narasi dan potongan video viral di media sosial yang menuduh adanya praktik pungutan liar (pungli) di Satpas Polres Binjai. Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Terkait isu yang beredar, pihak kepolisian telah menyerahkannya kepada Propam untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik," ujarnya ke media (13/11/2026) sore.

Melalui rilis resminya, Kasatlantas Polres Binjai menyampaikan poin-poin penting berikut:

- Komitmen Pelayanan Sesuai Prosedur: Seluruh mekanisme penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai, mulai dari tes kesehatan, psikologi, hingga tarif PNBP, telah mengikuti aturan resmi yang berlaku.

- Zero Tolerance untuk Pungli: Tidak ada toleransi bagi segala bentuk penyelewengan atau tindakan pungli. Jika terbukti ada anggota yang melanggar SOP, institusi kepolisian akan mengambil tindakan tegas.

- Imbauan dan Saluran Aduan Resmi: Masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki bukti terkait dugaan pelanggaran diminta untuk tidak sekadar memviralkan di media sosial, melainkan melapor secara resmi ke Propam Polres Binjai agar identitas dan kronologinya jelas untuk segera ditindaklanjuti secara hukum dan kedisiplinan.

- Waspada Hoaks dan UU ITE: Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta memahami risiko hukum terkait penyebaran konten hoaks atau pencemaran nama baik. **(J.Saragih)**

Kapolres Binjai Gelar Green Policing, Wujudkan Kepedulian Polri terhadap Kelestarian Lingkungan

BINJAI, BN – Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan Green Policing (Polisi Peduli Lingkungan) melalui penanaman pohon jenis kelapa pandan di Lapangan Polres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai, Jumat (13/11/2026) pukul 08.00 WIB.



Personil polisi saat melakukan penanaman pohon jenis kelapa pandan di Lapangan Polres Binjai. **(ist)**

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Binjai KOMPOL Sofyan H. NST., S.H., M.H., para Pejabat Utama (PJU), serta personel Polres Binjai.

Kapolres Binjai menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk kepedulian dan peran aktif Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang hijau, asri, sehat, dan berkelanjutan," ujarnya

Melalui penanaman pohon, Polres Binjai berupaya meningkatkan penghijauan, mengurangi polusi udara melalui penyerapan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta membantu mencegah bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengajak seluruh personel Polri dan masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan serta berperan aktif menjaga kelestarian alam.

Melalui program Green Policing, Kapolres Binjai menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup demi masa depan generasi mendatang. Polri Peduli Lingkungan, Alam Terjaga, Masa Depan Lebih Baik," terang AKBP Bimo Moernanda.

(Humasresbinjai/ J.Saragih)

Kapolres Asahan Sapa Anak Penderita Gangguan Saraf Motorik dan Berikan Tali Asih



Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT.

ASAHAN, BN - Kepedulian nyata ditunjukkan Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT. Tanpa protokol berlebih, beliau menyempatkan waktu berkunjung ke kediaman Eka Pasti Kirana Simanjuntak, seorang anak yang berjuang melawan penyakit Neurodegeneratif Progresif atau gangguan saraf motorik, di Dusun 2A, Desa Silomlom, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten

Kunjungan yang berlangsung pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 12.15 WIB ini bukan sekadar seremonial.Kapolres secara langsung menyerahkan taliasih kepada keluarga,yang diterima oleh Agi Satya Pananda Simanjuntak. Lebih dari itu, kehadirannya membawa semangat dan dukungan moril yang sangat berarti bagi keluarga yang sedang menghadapi masa-masa sulit.

"Ini adalah bagian dari kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir dengan kepedulian dan rasa kemanusiaan. Sekecil apa pun perhatian yang diberikan, semoga bisa menjadi kekuatan dan membawa kebahagiaan bagi sesama," ujar Kapolres.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Kasat Narkoba Polres Asahan, Kasi Humas Polres Asahan, Kapolsek Simpang Empat AKP Dian Putra, S.Sos.I., M.H., Camat Simpang Empat, serta Kepala Desa Silomlom. **(TP)**

Kwarcab Pramuka Asahan Gelar Kursus Pengelolaan Dewan Kerja 2026

ASAHAN, BN –Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Asahan menggelar Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPDK) Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Cabang Asahan.

Kegiatan KPDK dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Asahan Rianto yang juga waka mabicab Gerakan Pramuka Asahan, di Aula melati kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).



Wakil Bupati Asahan Rianto

KPDK Kwarcab Gerakan Pramuka Asahan tahun 2026 diikuti oleh 123 orang pramuka penegak dan pandega diantaranya 61 orang putra 62 putri dari DKR se-kabupaten Asahan 117 dan 3 orang perutusan dari Universitas, 2 dari kwarcab KotaTanjung Balai.Giat KPDK ini dilakukan selama 4 hari yakni dimulai pada 12-15 Nopember 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Usai membuka acara,Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan KPDK merupakan tonggak awal dalam menggerakkan roda organisasi Dewan Kerja Cabang dan Ranting Gerakan Pramuka Asahan dalam rangka membina dan melatih sikap kepemimpinan, kemandirian, ketakwaan, persaudaraan, kepedulian sosial, dan lingkungan hidup.

Selain itu juga, lanjut Rianto menjelaskan giat ini ditujukan untuk memberikan gambaran kepada dewan kerja untuk mengetahui potensi, sumber daya yang dimiliki, kemudian bagaimana mengelola sumberdaya yang ada untuk mensukseskan kegiatan yang dirancang. Kegiatan itu tidak saja berupa konsep ataupun rencana kerja, tetapi bagaimana cara mengeksekusi, mempertanggungjawabkan hasil kerja, dan menyusun program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Dilokasi yang sama,Kakwarcab Gerakan Pramuka Asahan Agus Ramanda menjelaskan ini merupakan forum pertemuan penegak dan pandega tentang pengelolaa dewan kerja mulai dari tugas pokok dan fungsi dewan kerja, pelaksanaan musyawarah dewan kerja dan administrasi dewan kerja.

"Materi yang pertama memberikan orientasi dulu kepada peserta terutama yang baru. Kemudian bagaimana hubungan kerjanya,karena peserta itu termasuk bagian dari DKR yang ada diKwaran," jelasnya.

Dengan diberikan materi tersebut, peserta itu tahu penempatan dirinya, dalam berkoordinasi dengan kwartirnya, sehingga nanti di dalam melaksanakan tugas, tidak lepas dari pengawasan orang dewasa. Kemudian tentang bagaimana memotivasi anggota DKR lainya," jelasnya.

"Termasuk juga nanti bagaimana mereka melakukan sidang-sidang ataupun Musyawarah Pramuka Penegak Pandega Puteri Putera (Musppanitera) dalam kegiatan. Sehingga menghasilkan sesuatu yang baik terhadap kwartirnya," tutup Agus

Pelaksanaan KPDK kali ini dilaksanakan ditengah keterbatasan akibat adanya efesiensi anggaran. Namun partisipasi Peserta Penegak dan Pandega menandakan semangat peserta Pramuka Penegak dan Pandega untuk membina dan menempa diri dengan semangat luar biasa.Hal ini tidak menjadi halangan untuk menyatukan kebersamaan jiwa kepemimpinan dan sosial untuk Pramuka Penegak dan Pandega di Kwartir Cabang Asahan. **(TP)**

Bupati Asahan Ikuti Ziarah Nasional Peringati Hari Pahlawan Tahun 2026

ASAHAN, BN - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos.,M.Si.,mengikuti kegiatan Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kisaran, Selasa (10/11/2026).



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin,S.Sos.,M.Si.,saat Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kisaran. **(ist)**

Kegiatan Ziarah Nasional tersebut dipimpin oleh Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan,Letkol Czi Andri Prasetyo, W.S. Hub. Int. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kapten Inf. K. Surbakti (Pasipers Kodim 0208/Asahan), sedangkan Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. Nuryanto (Danramil 15/Bandar Pulau).

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, dilaksanakan prosesi peletakan karangan bunga dan tabur bunga di makam para pahlawan sebagai bentuk penghormatan serta ungkapan rasa terimakasih atas jasa, pengabdian,dan pengorbanan para pejuang bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT.,Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Mochamad Judhy Ismono,S.H.,M.H.,Danlana l TBAyang diwakili Pasiops Lanal TBA Kapten Laut (P) Kuswanto, Kepala BNN Kabupaten Asahan Adrea Retha Zulhelfi, S.Pd., M.M.,DansubdenpomI/1-4 Kisaran Kapten CpmF.Otto Sipahutar,S.H.,para Asisten Setdakab Asahan, jajaran TNI-Polri, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, pelajar, anggota Pramuka, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan ziarah,BupatiAsahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya,melalui kegiatan ziarah tersebut, seluruh masyarakat diajak untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus memanjatkan doa agar arwah mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bupati juga menegaskan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, berkarya, serta melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui pembangunan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. "Saya berharap semangat juang, patriotisme, dan nilai-nilai kepahlawanan senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat rasa nasionalisme, serta bersama-sama mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin maju dan hebat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," katanya. **(TP)**

Anggota DPRD Bengkalis Sanusi Serap Aspirasi Warga Perumahan Mandau Lestari



Anggota DPRD Bengkalis Sanusi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Perumahan Mandau Lestari, Senin (16/11/2026).

KAB.BENGKALIS, BN – Anggota DPR Kab. Bengkalis dari Fraksi PKS, Sanusi, S.H., M.H., bersilaturahmi dengan masyarakat Perumahan Mandau Lestari, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung untuk menyerap aspirasi warga.

Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Di bidang kesehatan, warga meminta pelaksanaan fogging untuk mencegah meluasnya Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan perumahan.

Warga juga menanyakan kejelasan penetapan desil kesejahteraan, yang menjadi acuan penerima bantuan sosial, serta kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Selain itu, warga mengeluhkan kendala pengurusan BPJS Kesehatan dan layanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sanusi menyatakan akan di tanyakan ke dinas yg terkait, misalnya akan menindaklanjuti ke dinas dan instansi terkait. "Sanusi juga mengulangi memory bantuan jalan yang dijemput dari propinsi Riau," ujarnya.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban dan ditutup dengan doa/foto bersama. Warga berharap aspirasi yang disampaikan segera ditindaklanjuti.

(Rusdi)

DPR Sahkan ...

Sambungan hal 1

oleh para politikus di DPR setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026 lalu.

Para demonstran mengultimatum RUU itu disahkan sebelum 15 Desember 2026.

Kini, setelah pembahasannya di DPR rampung, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej berkata masyarakat menaruh harapan besar pada RUU ini.

"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (18/11).

Sementara, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengklaim bahwa pihaknya sudah "memproteksi" undang-undang ini dari kemungkinan digunakan sebagai alat kekuasaan dan pemerasan oleh aparat hukum. "Terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum, sudah kita proteksi," kata politisi Partai Gerindra, yang juga Ketua Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Rabu (18/11).

Habiburokhman tidak merinci keterangannya. Kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan aparat itu disuarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Hasil telaah YLBHI atas draf RUU itu menunjukkan adanya "persoalan serius".

Mulai hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, serta potensi penyalahgunaan kewenangan aparat, demikian YLBHI dalam situs resminya. YLBHI menilai, draf itu sudah mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur *non-conviction-based forfeiture* (NCBF). "Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya," kata YLBHI. "RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," demikian YLBHI.

ICW Soroti Pasal-Pasal Yang Hilang

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti hilangnya sejumlah pasal penting dalam RUU Perampasan Aset yang disahkan DPR pada Kamis (19/11).

Salah-satu pasal yang hilang, menurut ICW, yaitu aturan soal peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar (*illicit enrichment*). "Penghapusan *illicit enrichment* menjauh dari UNCAC Pasal 20, yang merekomendasikan negara mempertimbangkan perampasan peningkatan kekayaan pejabat yang tak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya," kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim, Kamis (19/11).

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi adalah perjanjian internasional multilateral anti-korupsi yang mengikat secara hukum. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005.

"Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional. Tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya," kata Ibrahim.

Temuan ICW, konsep illicit enrichment muncul sejak 2004 dan mulai gencar dibahas sejak 2006 setelah pengesahan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi (UNCAC). Aturan ini sempat masuk pada pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang dimulai pada 2008 dan pernah diusulkan juga untuk menginduk pada revisi UU Tindak Pidana Korupsi pada 2018. Namun, pasal itu dihilangkan dalam draf akhirnya.

Bagi ICW, konsep illicit enrichment ini penting, karena banyak kekayaan pejabat publik yang meningkat secara tidak wajar. Dimintai tanggapan atas penilaian ICW, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah DPR menyerap aspirasi para akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM). "Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga," ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman mengaku bahwa DPR juga telah mempelajari penerapan ketentuan tersebut di sejumlah negara. Dia menyebutkan, Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM.

Habiburokhman menjelaskan pula bahwa DPR tidak memasukkan ketentuan tersebut, lantaran UU Perampasan Aset adalah aturan formil yang mengatur tata cara atau hukum acara. Dengan demikian, lanjut dia, UU Perampasan Aset bukan aturan materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Alasan Habiburrohman ini dipertanyakan balik oleh ICW. "Kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini," kata Ibrahim, Kamis (19/11).

Bagaimanapun, ICW juga mempersoalkan penghilangan pasal lainnya yang mengatur perkara korupsi di masa lalu. Dalam UU tersebut dinilai tidak dapat menjangkau perkara korupsi di masa lalu. Padahal, menurut ICW, banyak kasus korupsi masa lalu bernilai fantastis yang berpotensi mengembalikan kerugian negara, termasuk dugaan korupsi pada era Orde Baru yang menyeret nama eks presiden Soeharto. "Kekayaan yang diduga berasal dari penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun sebagian besar tak pernah dipulihkan. Inilah alasan daya jangkau ke masa lalu penting dan ketentuan non-retroaktif (Pasal 72) justru menutup pintu itu," jelas Ibrahim. Dalam rilis tertulisnya, ICW juga menganggap pembahasan UU ini tidak transparan. Mereka kemudian berencana menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

(antara/bbcnews/red)

Bupati Apresiasi Polres Asahan Ungkap Kasus Narkoba



Jumpa pers pengungkapan kasus Narkoba Polres Asahan.

ASAHAN, BN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Resor (Polres) Asahan atas keberhasilan Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) mengungkap empat kasus peredaran gelap narkotika selama periode Oktober hingga November 2026.

Dari empat pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan lima orang tersangka,terdiri dari empat laki-laki dan satu perempuan, serta menyita barang bukti narkotika dalam jumlah besar.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Asahan saat menghadiri konferensi pers (press release) pengungkapan kasus narkotika yang digelar di Aula Wira Satya Polres Asahan, Selasa (10/11/2026). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H.,S.I.K., M.Sc.IT.

Turut hadir dalam kegiatan, Kajari Asahan, mewakili Danyon 126/KC,mewakili DanyonTP954 Naga Berkisar, mewakili Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Danlanal Tanjung Balai-Asahan, Kepala BNN Kabupaten Asahan, mewakili Ketua PN Kisaran dan para awak media.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Asahan, AKBP Adi Dharma Pramudhita, S.H., S.I.K., M.Sc.IT., menjelaskan bahwa dari empat kasus yang berhasil diungkap, Satres Narkoba Polres Asahan mengamankan barang bukti berupa 33,1 kilogram sabu, 20.000 butir pil ekstasi, serta 598 cartridge vape yang diduga mengandung cairan narkotika jenis etomidate.

Bupati Asahan,Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolres Asahan beserta seluruh jajaran atas kerja keras dan keberhasilannya mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar.

Bupati menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi muda serta masa depan bangsa, khususnya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Bupati juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai langkah yang dilakukan Polres Asahan dalam memberantas peredaran narkoba,baik melalui upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat maupun upaya represif melalui penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkotika.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Asahan memiliki wilayah geografis yang cukup luas dan garis pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan pengawasan bersama guna mengantisipasi masuk serta berkembangnya jaringan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Asahan. **(TP)**

Korupsi KUR ...

Sambungan hal 1

mempunyai usaha produktif dan layak, tidak dilakukannya verifikasi dokumen secara benar, serta penguasaan buku tabungan dan ATM oleh pihak Collection Agent." jelas Aspidsus Dr. IG Punia Atmaja bersama Asintel dan jaksa penyidik.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, kerugian keuangan negara dalam perkara penyaluran KUR Mikro BNI Jember mencapai Rp 41.487.138.481. Dari jumlah tersebut, kerugian melalui CV Karomah Jaya Mandiri sebesar Rp 3.301.848.868, sedangkan melalui Pokmas Titipan Barokah sebesar Rp 2.955.008.424.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Terhadap tersangka A, JAC, dan HP, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejati Jatim. Ketiganya menyusul tersangka ASH yang lebih lebih dahulu ditahan.

Pengungkapan perkara ini bermula dari laporan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai wujud komitmen perusahaan dalam memberantas praktik fraud di lingkungan perbankan. Atas penanganan perkara tersebut, pihak BNI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan atas langkah cepat dalam menindaklanjuti laporan hingga proses penegakan hukum berjalan secara profesional.

Kejati Jatim akan terus mendalami perkara ini guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memastikan pertanggungjawaban hukum atas penyimpangan penyaluran dana KUR yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat pelaku usaha produktif. **(hms kejati)**

Diduga Korupsi ...

Sambungan hal 1

tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar (pungli) dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Pemprov Jatim, Senin (16/11/2026).

Asisten Tindak Pidana Khusus, Dr. IG Punia Atamaja, mengungkapkan penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya keterlibatan NK dalam praktik pungli selama menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM. "Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, NK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin." Ujar Aspidsus didampingi Asintel dan Tim Penyidik.

Aspidsus menjelaskan, praktik pungutan tersebut terjadi pada dua bidang. Pada bidang pertambangan, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon dengan total Rp1.105.000.000. Sementara pada bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133.500.000. Dari kedua bidang tersebut, total pungutan liar mencapai Rp1.238.500.000.

Dalam perkara ini, Tim Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga dinikmati tersangka NK dari hasil tindak pidana, berupa uang tunai sebesar Rp 615.000.000 dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan tersebut telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Penetapan NK sebagai tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026. Penetapan ini sekaligus menambah daftar tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut menjadi lima orang. Sebelumnya, Tim Penyidik telah lebih dahulu menetapkan empat orang tersangka, masing-masing berinisial AM, H, ED, dan almarhum OS.

NK, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, selanjutnya digiring ke Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim untuk dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. **(hms kejati/es)**

TMMD di Pamekasan Berhasil Renovasi 110 Rutilahu dan Bangun Infrastruktur Jalan

PAMEKASAN, BN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menutup rangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Pamekasan, Kamis (12/11).



Gubernur Jatim Khofifah duduk bersama dengan Kasad Jendral TNI Tandyo saat penutupan TMMD (foto: istimewa)

Upacara penutupan yang dipimpin langsung KASAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ini, juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

Gubernur Khofifah mengatakan, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan di desa.

Melalui program ini, berbagai kebutuhan masyarakat desa dapat ditangani secara bersama, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

"TMMD ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga bagaimana kita bersama-sama menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat bergotong royong, berkolaborasi bersama maka pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga," kata Khofifah.

Bentuk konkret kolaborasi tersebut terlihat dari penanganan Rutilahu. Secara keseluruhan, sebanyak 110 unit rumah di Pamekasan menjadi sasaran penanganan melalui dukungan lintas pihak, yakni 94 unit dari Pemprov Jatim, 10 unit dari Pemkab Pamekasan, serta 6 unit melalui program Bakti Karya TNI AD.

Sinergi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan hunian yang layak.

"Sinergi dan kolaborasi TNI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten menjadi kunci agar pembangunan berjalan lebih optimal dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat," katanya.

Selain Rutilahu, sasaran fisik TMMD ke-130 juga mencakup pembangunan dua titik sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat. Kemudian pembangunan jalan baru dan tembok penahan tanah sepanjang 450 meter, pengaspalan jalan, pembangunan saluran air, satu unit MCK, serta satu unit box culvert.

Program ini juga dilengkapi kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan penanaman 500 pohon trembesi. Seluruh sasaran TMMD ke-130 dilaporkan tercapai 100 persen dengan pelaksanaan yang berlangsung aman dan lancar.

Khofifah menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya oleh masyarakat. Karena itu, keterlibatan warga dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan menjadi hal penting.

"Yang tidak kalah penting adalah bagaimana hasil pembangunan ini dijaga dan dimanfaatkan bersama. Jangan sampai setelah program selesai, fasilitas yang sudah dibangun tidak terawat. Gotong royong masyarakat harus terus berlanjut agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang," tegasnya.

Sementara itu, KASAD Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Bupati Pamekasan atas dukungan anggaran dalam pelaksanaan TMMD. Menurutnya, TMMD merupakan implementasi Pasal 30 UUD 1945, khususnya mengenai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

"TMMD merupakan implementasi dari Pasal 30 UUD 1945, khususnya bagaimana kita membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Karena itu, seluruh komponen masyarakat dan bangsa harus bersatu padu. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Bapak Bupati yang telah memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan TMMD ini," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan melalui TMMD tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Karena itu, masyarakat diharapkan ikut menjaga dan memelihara berbagai fasilitas yang telah dibangun bersama.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memelihara apa yang sudah kita bangun bersama. Ini merupakan kontribusi kita semua, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tandyo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Khofifah dan seluruh masyarakat Jawa Timur atas ditetapkannya empat tokoh asal Jatim sebagai Pahlawan Nasional tahun 2026.

"Secara khusus, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Gubernur Khofifah dan seluruh masyarakat Jawa Timur atas ditetapkannya empat tokoh asal Jawa Timur sebagai Pahlawan Nasional tahun 2026. Ini tentu menjadi kebanggaan bersama. Semoga penghargaan tersebut semakin menguatkan nilai-nilai patriotisme dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya.

Sebagai tambahan, rangkaian penutupan TMMD ke-130 juga dimeriahkan dengan atraksi terjun payung, kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, serta pameran produk UMKM. Tak hanya itu, gelaran turut diisi dengan masak besar oleh Chef Bobon yang menyajikan sebanyak 3.000 porsi makanan untuk masyarakat. **(dji)**

Satlantas Polres Kuningan Bekali Siswa SMAN 1 Ciawigebang Edukasi Keselamatan Berkendara



Para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, ikuti sosialisasi dan penyuluhan hukum Satlantas Polres Kuningan, Kamis (19/11/2026).

KUNINGAN, BN - Upaya menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif terus digencarkan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kuningan. Melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas), kepolisian menggelar program preemtif

Bertajuk "Polisi Sahabat Pelajar" yang menyasar ratusan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, pada Kamis (19/11/2026).

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 yang tengah berlangsung serentak di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kehadiran personel kepolisian di lingkungan sekolah tersebut disambut antusias oleh para pelajar beserta jajaran tenaga pendidik.

Fokus pada Pencegahan Pelanggaran Fatal

Dalam sesi pemaparan materi yang dikemas secara komunikatif, tim penyuluh dari Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Kuningan membedah berbagai faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang sebagian besar diawali oleh pelanggaran aturan.

Petugas memberikan penekanan khusus terkait sejumlah poin krusial kepada para pelajar, di antaranya:

Kewajiban Kepemilikan SIM: Mengingatkan batas usia minimal pengemudi serta larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi pelajar yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kelengkapan Keselamatan: Kewajiban menggunakan helm berstandar Nasional Indonesia (SNI) dengan pengait yang terpasang sempurna (klik), baik bagi pengendara maupun pembonceng.

Larangan Knalpot Tidak Standar dan Balap Liar: Tindak tegas terhadap penggunaan knalpot bising (brong), aksi ugal-ugalan, berboncengan lebih dari satu orang, serta keterlibatan dalam aksi balap liar yang membahayakan keselamatan umum.

Etika dan Konsentrasi Berkendara: Larangan mengoperasikan telepon genggam saat berkendara serta pentingnya memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Membangun Kesadaran sebagai Pelopor Keselamatan

Perwakilan Satlantas Polres Kuningan yang memimpin jalannya kegiatan menyampaikan bahwa pendekatan edukatif kepada generasi muda jauh lebih efektif untuk membangun budaya tertib berlalu lintas jangka panjang, dibandingkan sekadar mengedepankan penindakan hukum di jalan raya.

"Pelajar adalah aset bangsa sekaligus kelompok usia yang cukup rentan terlibat dalam insiden lalu lintas apabila tidak dibekali pemahaman yang tepat. Melalui momentum Operasi Zebra Lodaya 2026 dan program Polisi Sahabat Pelajar ini, kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan merangkul adik-adik sekalian agar peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Ia juga menambahkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena adanya petugas yang berjaga di lapangan.

Sinergi Positif Pihak Sekolah dan Kepolisian

Sementara itu, pihak manajemen SMA Negeri 1 Ciawigebang memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif jajaran Polres Kuningan yang turun langsung memberikan pembinaan karakter dan kedisiplinan kepada peserta didik.

Pihak sekolah menilai kolaborasi antara institusi pendidikan dan kepolisian sangat dibutuhkan untuk membentengi para siswa dari perilaku negatif di luar jam sekolah, khususnya terkait ketertiban di jalan raya.

Suasana sosialisasi berlangsung dinamis dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Sejumlah siswa tampak aktif mengajukan pertanyaan seputar regulasi lalu lintas terkini hingga mekanisme penerbitan SIM.

Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Kuningan berharap seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Ciawigebang dapat menjadi agen perubahan (agent of change) serta pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas. **(Ed)**

Tim Hukum Yakuza Maneges Laporkan Advokat AK ke Polres Kediri

KEDIRI, BN — Konflik antara kelompok Yakuza Maneges dan kuasa hukum terduga pelaku kekerasan seksual memasuki babak baru. Tim Hukum Yakuza Maneges resmi melaporkan seorang oknum berinisial AK yang berprofesi sebagai advokat ke Polres Kediri. Laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran berita tidak benar yang dinilai merusak kehormatan organisasi dan pimpinan tertinggi mereka.

Langkah hukum tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Tim Hukum Yakuza Maneges, Ikbal Sermaf, S.H., M.H., didampingi anggota tim Moh Zakki, saat menggelar konferensi pers di halaman Mapolres Kediri pada Rabu, 18 November 2026.

Klarifikasi dan Bantahan Tegas Yakuza Maneges

Jumpa pers ini digelar sebagai bentuk klarifikasi untuk meluruskan berbagai pemberitaan miring yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Menurut Ikbal, pemberitaan tersebut telah memunculkan persepsi negatif di ruang publik serta berpotensi memicu gesekan antar organisasi, mengingat terlapor AK sempat mengklaim diri sebagai penasihat hukum dari organisasi tertentu.

"Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, kami hadir untuk meluruskan berita yang berkembang. Terlapor AK diduga telah menyebarkan berita yang tidak benar, mencemarkan nama baik, serta melakukan fitnah terhadap pimpinan tertinggi Yakuza Maneges, Den Gus Thuba," ujar Ikbal.

Dalam laporan tersebut, pihak Yakuza Maneges menjerat terlapor menggunakan Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait pencemaran nama baik dan fitnah yang menyerang kehormatan organisasi.

Kronologi Penjemputan dan Klaim Bukti Video

Terkait tudingan penculikan dan penganiayaan yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak AK ke Polres Kediri, Yakuza Maneges memberikan bantahan keras. Mereka menegaskan bahwa proses penjemputan terduga pelaku kekerasan seksual dilakukan secara terbuka, legal, serta melibatkan perangkat setempat.

Pendampingan Formal: Penjemputan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan ketua RT/RW, perangkat desa, serta disaksikan langsung oleh orang tua terduga pelaku.

Bukti Rekaman: Pihak Yakuza Maneges mengaku memegang dokumen rekaman video berdurasi lebih dari dua jam yang membuktikan bahwa kondisi fisik terduga pelaku dalam keadaan bersih tanpa ada luka apa pun saat diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri.

Kehadiran Berdasarkan Surat Kuasa Korban

Sementara itu, anggota Tim Penasihat Hukum Yakuza Maneges Kediri, Moh Zakki, dengan tegas menepis anggapan bahwa kelompoknya bertindak sebagai pihak yang main hakim sendiri (vigilantism). Zakki menjelaskan bahwa keterlibatan Yakuza Maneges dalam perkara ini murni dilandasi oleh mandat resmi untuk membela korban kekerasan seksual yang selama ini merasa kesulitan mendapatkan keadilan.



Ketua Tim Hukum Yakuza Manege, Ikbal Sermaf, SH, MH, saat menggelar jumpa pers (ND)

"Kehadiran Yakuza Maneges itu atas dasar kuasa yang diberikan oleh korban. Atas dasar kuasa itulah kami mendampingi korban," tegas Zakki.

Zakki juga menantang pihak-pihak tertentu agar tidak asal melontarkan tudingan penculikan atau penganiayaan tanpa didukung oleh alat bukti yang valid secara hukum.

"Kalau memang ada tuduhan penganiayaan, harus dibuktikan. Siapa yang menganiaya, di mana kejadiannya, kapan, bagaimana caranya, apa buktinya, dan siapa saksinya. Itu yang harus diperjelas," pungkasnya.

Sementara terlapor AK belum berhasil dikonfirmasi bidiknasional.com, klarifikasi AK ditunggu redaksi melalui email : bidiknasional@yahoo.com atau WA 08123209649. **(ND)**

Pemdes Jono Gelar Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui KDMP



Suasana sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDMP Desa Jono yang diikuti kelompok tani dan Gapoktan di Gedung KDMP Desa Jono, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, Rabu (18/11/2026). **(dok. foto: pri)**

BOJONEGORO, BN – Pemerintah Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menggelar sosialisasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang nantinya akan disalurkan melalui KDMP. Sosialisasi ini membahas sistem, mekanisme, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Gedung KDMP Desa Jono pada Rabu (18/11/

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Pemdes Temayang dan KDMP Gelar Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Kegiatan Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pemdes Temayang dan KDMP. **(ist)**

BOJONEGORO, BN – Dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah pusat, Pemerintah Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, menggandeng Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memberikan sosialisasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Balai Desa Temayang, Kamis (19/11).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), manajer dan ketua KDMP, serta unsur Forkopimcam Kecamatan Temayang. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para petani mengenai tata cara penyaluran

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Saat Bupati Ipuk ...

Sambungan hal 1

Sementara itu, Bupati Ipuk menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak bisa berjalan sendiri. Apalagi, Banyuwangi dan Situbondo merupakan daerah bertetangga yang memiliki banyak peluang untuk saling mendukung.

"Prinsip kami tumbuh bersama. Kalau Situbondo maju, Banyuwangi juga ikut merasakan dampaknya. Begitu pula sebaliknya. Bisa dari sisi ekonomi, pariwisata, maupun pelayanan publik," kata Ipuk.

Ipuk pun memberikan apresiasi terhadap perkembangan Situbondo di bawah kepemimpinan Rio. Ia melihat Situbondo terus bergerak dan menunjukkan kemajuan. "Saya lihat Situbondo terus bergerak maju. Mas Rio juga mendapat tempat di hati masyarakatnya. Saya kira harus dilanjutkan ke periode dua," ujar Ipuk sambil tersenyum.

Ipuk menambahkan, Banyuwangi selalu terbuka untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama daerah lain. Menurutnya, setiap daerah memiliki kelebihan dan pengalaman yang bisa saling melengkapi. "Kami mengapresiasi semangat Mas Rio dan jajaran Pemkab Situbondo untuk terus berinovasi. Kita semua masih harus terus belajar. Yang penting, bagaimana kemajuan satu daerah bisa ikut mendorong kemajuan daerah lainnya," tutur Ipuk.

Setelah pertemuan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi teknis antarorganisasi perangkat daerah (OPD) kedua kabupaten. Sejumlah hal dibahas, mulai dari penguatan pelayanan publik, kesehatan, hingga strategi percepatan pembangunan daerah. **(Dj/Ydh/Hms)**

Khofifah Lantik ...

Sambungan hal 1

Dengan terisinya posisi-posisi tersebut, ia berharap kinerja perangkat daerah dapat semakin optimal.

Karena itu, Gubernur Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, tantangan dan agenda yang harus ditangani setiap perangkat daerah menuntut langkah cepat serta koordinasi yang kuat.

"Menjadi komandan di dinas perkebunan, Disperindag, Bakorwil Pamekasan dan Madiun, Biro perekonomian dan biro pengadaan barang jasa harus sangat cepat melakukan adaptasi di lingkungan masing-masing," ujarnya.

Secara khusus, Khofifah meminta Kepala Dinas Perkebunan memaksimalkan program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu. Program ini menjadi salah satu upaya mendukung target nasional swasembada gula, dengan Jawa Timur sebagai salah satu daerah penting dalam pengembangan komoditas tebu.

Ia menambahkan, memasuki musim hujan menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan bongkar ratoon. Kepala Dinas Perkebunan pun diminta segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta para bupati agar program berjalan optimal. "Memasuki musim hujan, bongkar ratoon sudah bisa dimulai. Koordinasi dengan Dirjen Perkebunan serta bupati terkait," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta meningkatkan pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, hingga Idul Fitri. Khofifah menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.

Ia mencontohkan sejumlah komoditas, termasuk tepung terigu, yang pergerakan harganya perlu dicermati agar tidak terjadi lonjakan secara tiba-tiba. Untuk itu, koordinasi dengan Perum Bulog, distributor, dan berbagai pemangku kepentingan harus diperkuat.

"Segera berkoordinasi dengan Bulog, distributor dan Disperindag harus banyak turun ke pasar bertemu warga sambil melakukan sinergi lintas sektor," jelasnya.

Khofifah juga mengingatkan Kepala Bakorwil Pamekasan dan Madiun agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Terlebih, peringatan cuaca BMKG menunjukkan potensi hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, pada Januari hingga Februari.

Khofifah mengingatkan, Bakorwil memiliki posisi strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi di wilayah. Kedekatan dengan masyarakat membuat Bakorwil diharapkan mampu mendeteksi persoalan lebih awal sekaligus mempercepat koordinasi dan pelayanan pemerintah.

"Bakorwil menjadi mata, telinga dan layanan Pemprov Jatim yang lebih awal karena lebih dekat dengan masyarakat," ungkapnya.

Kepada Kepala Biro Perekonomian, Khofifah menyampaikan bahwa biro tersebut ke depan akan mendapat tambahan kewenangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD). Dengan perluasan peran itu, Biro Perekonomian diharapkan dapat memperkuat fungsi pemantauan, mitigasi, dan evaluasi terhadap kinerja BUMD.

Khofifah menegaskan, BUMD memiliki peran penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, pengelolaannya harus terus dipantau agar berjalan sehat, profesional, dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

Adapun kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Ia menilai proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi risiko penyimpangan sehingga harus dikelola secara transparan dan akuntabel. **(dji)**

Cek Kesehatan Gratis ...

Sambungan hal 12

Kabupaten Malang sebagai momentum memperluas keterlibatan seluruh elemen pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

"Salah satu fokus kegiatan adalah mendekatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu, Dinkes Kabupaten Malang menyediakan stan khusus Cek Kesehatan Gratis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, termasuk pada sesi sore hari. CKG gratis yang kami sediakan di pojok pelayanan. Layanan ini terbuka untuk masyarakat umum. Jadi, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan," tegasnya.

Selain layanan CKG, Dinkes Kabupaten Malang juga menggelar Expo Kesehatan dengan melibatkan sejumlah rumah sakit besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang. Masing-masing rumah sakit membuka gerai untuk memperkenalkan produk, fasilitas, serta jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., juga menerangkan bahwa partisipasi rumah sakit swasta merupakan bagian penting dari penguatan sistem pelayanan kesehatan daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta dinilai diperlukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi serta akses pelayanan kesehatan.

"Rangkaian kegiatan juga melibatkan jajaran puskesmas melalui sejumlah agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berlangsungnya senam sehat bersama juga menjadi salah satu kegiatan utama yang diikuti oleh warga Kepanjen dan keluarga besar Dinkes Kabupaten Malang. Selain mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik, kegiatan tersebut juga diisi oleh gelar wicara kesehatan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan upaya pencegahan penyakit," terangnya.

Tak sebatas itu, pameran kesehatan dan Puskesmas Innovation Award turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan. Ajang penghargaan inovasi tersebut menjadi ruang bagi puskesmas untuk memperkenalkan berbagai terobosan pelayanan kesehatan yang dikembangkan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., menambahkan bahwa rangkaian peringatan HKN dan Hari Jadi Kabupaten Malang juga dilanjutkan dengan sejumlah agenda hingga sore dan malam hari.

"Melalui berbagai kegiatan tersebut, Dinkes Kabupaten Malang menghimbau bahwa peningkatan derajat kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan pengobatan. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan secara tepat harus terus diperkuat," imbuhnya.

drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., dalam momentum HKN dan Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang ini diharapkan menjadi penggerak kolaborasi antara Dinkes, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, berkualitas, dan merata.

"Semangat Sehat untuk Semua jangan berhenti sebagai tema peringatan, tapi harus benar-benar diwujudkan melalui pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang," tutupnya. **(ADV/NN)**

Pemdes Jono ...

Sambungan hal 10

2026). Dalam kegiatan ini, Pemerintah Desa Jono mengundang sejumlah anggota Gapoktan dan kelompok tani untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pembelian pupuk bersubsidi melalui KDMP.

Selain itu, Pemdes Jono bersama KDMP juga menghadirkan pihak Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait mekanisme dan prosedur pembelian pupuk bersubsidi di KDMP, sehingga para petani dapat memahami aturan yang berlaku.

Kepala Desa Jono, Dra. Heni Meindrawati, dalam sambutannya di hadapan para undangan menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu sarana pelayanan masyarakat yang terbuka untuk umum, khususnya bagi warga Desa Jono.

"Koperasi Desa Merah Putih ini terbuka untuk umum, khususnya masyarakat Desa Jono. Dengan dibukanya KDMP ini, insya Allah ke depan pelayanan kepada masyarakat akan semakin lengkap dan maksimal. Selain itu, KDMP juga menyediakan pupuk bersubsidi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), di antaranya pupuk Urea dan NPK. Kehadiran KDMP diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tanpa harus pergi jauh," ungkapnya.

Sementara itu, para peserta sosialisasi menyambut baik keberadaan KDMP yang dinilai dapat memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut antara lain Ketua KDMP beserta manajer dan karyawan KDMP, unsur Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) Temayang, jajaran Polsek Temayang, Koramil Temayang, anggota Gapoktan, kelompok tani, serta tamu undangan lainnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh petani di Desa Jono dapat memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDMP sehingga proses distribusi dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Desa Jono. **(pri)**

Ahli Waris ...

Sambungan hal 2

terang. Kami masih tetap melanjutkan upaya hukum karena sampai saat ini belum ada respons positif," kata Irawan.

Dalam petitum gugatannya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan tidak sah dan batal demi hukum setiap peralihan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya sebagai ahli waris. Selain itu, penggugat meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp100.370.000.000 atau Rp100,37 miliar yang diminta dibayarkan secara tunai oleh para tergugat.

Tak hanya itu, penggugat turut mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp250 miliar. Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi dalam perkara tersebut mencapai Rp 350,37 miliar.

Sementara itu, Antoni Prabowo Handojo menjelaskan bahwa perusahaan yang berdiri pada era 1980-an tersebut awalnya dibangun oleh dua keluarga dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 50 persen.

Setelah salah satu pendiri perusahaan, Prof. Indro Handojo, meninggal dunia pada 4 Januari 2011, disebut telah dibuat akta pembagian waris di hadapan notaris.

Dalam pembagian waris tersebut, Antoni mengaku memperoleh bagian sebesar 25 persen, termasuk hak atas saham perusahaan yang diwariskan kepadanya.

Namun, menurut dalil penggugat, dalam perkembangannya terjadi sejumlah perubahan komposisi kepemilikan saham dan susunan kepengurusan perusahaan tanpa melibatkan dirinya.

Bahkan, Antoni menyebut terdapat sekitar 10 kali perubahan anggaran dasar perusahaan sejak 2011 hingga 2026. Perubahan tersebut kini menjadi salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan melalui gugatan di PN Sidoarjo. "Terdapat sekitar 10 kali perubahan anggaran dasar sejak 2011 hingga 2026 yang kini menjadi bagian dari materi sengketa di pengadilan," terangnya. **(Teddy Syah)**

Walikota Probolinggo ...

Sambungan hal 4

kan, pengelolaan aset Pemkot Probolinggo masih menyisakan persoalan. Termasuk pengelolaan Pasar Gotong Royong, masih terus dibenahi. Menurutnya, maraknya pasar *online* sangat berdampak terhadap pasar tradisional seperti Pasar Gotong Royong.

"Sekarang kami mencoba menata kembali Pasar Gotong Royong. Kami coba tiang-tiang yang menjadi penghalang dihilangkan. Meski kondisi sekarang pasar tradisional berat karena pasar *online*," ujarnya.

Aminuddin mengaku membuka lebar-lebar bagi investor yang ingin membangun hotel di Kota Probolinggo. "Silakan, tidak hanya aset Pasar Gotong Royong. Jika ada investor mau membangun hotel di atas Pasar Baru, juga kami terbuka," terangnya.

Diruangan terpisah, Anggota DPRD Kota Probolinggomengatakan, harus ada langkah maju dari Pemkot untuk mengelola aset yang selama ini menjadi beban daerah. Aset itu harus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga aset-aset yang menjadi beban daerah seperti Pasar Gotong Royong, bisa ditawarkan kepada investor.

"Lokasi Pasar Gotong Royong yang seluas 5.346 meter persegi itu bisa dibangun hotel bintang 5 dan pusat perbelanjaan modern. Tentu perlu diawali dengan kajian yang komprehensif mengenai dampak dan akibat dari kebijakan apa pun yang akan diambil di kemudian hari," ujar ketua Ketua Fraksi Gerakan Pembangunan Indonesia Raya (Gembira) ini.

Ia juga menyayangkan adanya polemik yang terjadi dalam pengelolaan aset, seperti Probolinggo Plaza. Akibat kebijakan pemerintah di masa lalu, sumber PAD dari aset daerah ini terhambat. **(Son)**

Hari Kesehatan Nasional ...

Sambungan hal 12

rintah juga perlu mengetahui alasan masih adanya orang tua yang belum membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi.

"Karena itu, ia mendorong pemantauan berbasis wilayah agar setiap posyandu memiliki data mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melalui pemetaan tersebut, kader dan petugas kesehatan dapat mengidentifikasi posyandu yang aktif, wilayah dengan cakupan imunisasi rendah, serta kelompok masyarakat yang belum terjangkau pelayanan," terangnya.

Menurut Hj. Anis Zaidah Sanusi, bahwasannya kader juga diharapkan memiliki mekanisme komunikasi dan pelaporan yang responsif ketika menemukan kendala di lapangan. Misalnya, ketika orang tua menolak imunisasi karena terpengaruh mitos atau terkendala kesibukan pekerjaan, kader perlu menyampaikan laporan agar petugas terkait dapat melakukan pendekatan dan pendampingan.

"Setiap laporan tidak boleh berhenti menjadi catatan. Harus ada pihak yang menindaklanjuti sampai persoalan tersebut menemukan solusi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan, pentingnya evaluasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar mencari pihak yang bertanggung jawab atas kekurangan pelaksanaan program.

Sementara itu, dokter spesialis anak dr. Firyal Nadiah Rahmah menjelaskan, polio merupakan penyakit infeksi virus akut yang menular melalui jalur fekal-oral, yakni ketika virus dari tinja mencemari air atau makanan dan kemudian masuk ke tubuh manusia.

"Penyakit tersebut perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kelumpuhan permanen hingga gagal napas akibat gangguan pada otot pernapasan. Bahkan, sebagian besar infeksi polio tidak menunjukkan gejala sehingga seseorang dapat terinfeksi tanpa menyadarinya," jelasnya.

Selain itu, lanjut dr. Firyal Nadiah Rahmah, mengenai kondisi tersebut membuat imunisasi menjadi langkah penting untuk melindungi anak dari risiko polio. Terdapat dua jenis vaksin yang digunakan dalam program imunisasi polio, yakni Oral Polio Vaccine (OPV) dan Inactivated Polio Vaccine (IPV).

"Seperti OPV diberikan melalui tetes mulut untuk membantu membentuk kekebalan pada saluran pencernaan. Sementara IPV diberikan melalui suntikan untuk merangsang pembentukan antibodi dalam darah yang melindungi anak dari risiko kelumpuhan akibat polio," paparnya.

dr.Firyal Nadiah Rahma juga memastikan, vaksin polio yang beredar di Indonesia telah melalui tahapan pengujian dan penilaian oleh lembaga terkait.

"Terkait efek samping, anak terkadang mengalami demam ringan, kemerahan, atau pembengkakan di area suntikan IPV. Reaksi tersebut merupakan efek ringan yang umum terjadi setelah imunisasi," tandasnya.

Melalui talkshow tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berharap sinergi tenaga kesehatan, TP PKK, Tim Pembina Posyandu, dan kader semakin kuat. Penguatan pendataan, pemantauan wilayah, serta tindak lanjut terhadap kendala di lapangan diharapkan dapat mendorong pemerataan pelayanan imunisasi sehingga tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan dari polio. (ADV/NN)

Pemdes Temayang ...

Sambungan hal 10

pupuk bersubsidi sesuai regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang tata kelola penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Temayang, H. Mohamad Erpan, mengatakan bahwa pemerintah desa hanya berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan mekanisme baru penebusan pupuk bersubsidi melalui KDMP sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.

"Kami mengundang Gapoktan, Poktan, dan seluruh anggota agar memahami regulasi penyaluran serta tata cara penebusan pupuk bersubsidi melalui KDMP," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Pertanian melalui PPL menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Pertama melalui kelompok tani (Poktan), dan kedua melalui penyaluran secara individu melalui KDMP yang telah tercatat dalam sistem.

"Ada dua cara memperoleh pupuk bersubsidi, yakni melalui kelompok tani dan melalui individu lewat KDMP yang terdata dalam sistem," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Danramil Temayang, Kapten Infanteri Andi Siswanto, menegaskan bahwa fungsi Koramil dalam hal ini adalah melakukan pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan penjualannya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). **(Pri)**

Mengenal Dunia Bahari, Siswa TK PGRI 03 Ungkalan Jember Gelar Outing Class Edukatif di UPT PPP Puger



Anak-anak TK PGRI 03 Ungkalan, Jember, saat mengikuti kegiatan Outing Class ke UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Puger. **(dkp)**

JEMBER, BN - Mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kelestarian laut dan keselamatan bahari perlu ditanamkan sejak usia dini. Hal tersebut ditunjukkan oleh puluhan anak dari **TK PGRI 03 Ungkalan, Jember**, yang menggelar kegiatan *Outing Class* ke **UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Puger**, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa 27 Oktober 2026.

Selama kunjungan edukatif ini, para siswa tampak antusias mengikuti serangkaian agenda pengenalan dunia kelautan dan perikanan yang dipandu langsung oleh para petugas teknis UPT PPP Puger.

5 Rangkaian Agenda Edukasi Bahari

1. Edukasi Biota Laut dan Satwa yang Dilindungi

Anak-anak diajak diawali dengan pemberian pemahaman dasar mengenai keanekaragaman hayati laut. Petugas memberikan penjelasan dengan bahasa yang ramah anak tentang pentingnya menjaga ekosistem laut serta mengenalkan jenis-jenis biota laut dan ikan yang dilindungi agar tidak ditangkap atau dirusak habitatnya.

2. Pentingnya Keselamatan Saat Melaut (*Safety First*)

Keselamatan jiwa di laut menjadi salah satu poin krusial yang diajarkan. Petugas UPT PPP Puger memperagakan dan mempraktikkan langsung cara penggunaan alat keselamatan melaut, seperti jaket pelampung (*life jacket*) dan ban penyelamat (*lifebuoy*). Para siswa juga berkesempatan mencoba mengenakan jaket pelampung untuk memberikan pengalaman langsung (*hands-on experience*).

3. Memahami Proses Pembuatan Kapal di Docking Kapal

Memasuki area *docking* (galangan kapal) UPT PPP Puger, para siswa berkesempatan melihat langsung proses pembuatan dan perbaikan kapal tradisional nelayan berbahan kayu. Petugas menjelaskan struktur fisik kapal serta tahap-tahap pembangunan armada tangkap yang digunakan oleh nelayan Puger.

4. Pengenalan Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan

Selanjutnya, anak-anak diajak melihat langsung beragam jenis alat tangkap ikan, seperti jaring tangkap. Petugas menerangkan fungsi jaring serta pentingnya penggunaan alat tangkap yang aman dan ramah lingkungan demi menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

5. Mengamati Pemasaran Hasil Tangkapan di Kios Ikan Nelayan (KIN)

Kegiatan diakhiri dengan mengunjungi Kios Ikan Nelayan (KIN) yang berada di kawasan pelabuhan. Di sini, anak-anak melihat secara langsung alur rantai ekonomi perikanan, mulai dari ikan hasil tangkapan darat hingga proses transaksi jual beli antara pedagang dan konsumen.

Menanamkan Kesadaran Bahari Sejak Dini

Kegiatan *outing class* ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar di luar kelas yang menyenangkan (*fun learning*) sekaligus menumbuhkan kepedulian serta kecintaan anak-anak terhadap dunia bahari, keselamatan nelayan, serta kelestarian laut sejak dini.

Pihak sekolah mengapresiasi sambutan hangat dan pendampingan edukatif dari UPT PPP Puger yang telah memfasilitasi jalannya kegiatan dari awal hingga selesai dengan tertib dan lancar. **(dkp/adv)**



Dinkes Gelar Cek Kesehatan Gratis di Stadion Kanjuruhan, Peringati HKN ke-62 dan Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., Saat Menyampaikan Rangkaian Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 dan Hari Jadi Kabupaten Malang ke-1266. **(Foto : Nino Wiwantara)**

KAB. MALANG, BN - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pameran rumah sakit, hingga Puskesmas Innovation Award di Stadion Luar Kanjuruhan Kepanjen, Jumat (13/11/2026), dalam rangka memadukan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-62 dengan Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., menjelaskan bahwa keikutsertaan rumah sakit swasta merupakan bagian penting dari penguatan pelayanan kesehatan daerah. Bentuk kolaborasi antara pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta diperlukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi sekaligus mengakses pelayanan kesehatan.

"Berbagai rumah sakit besar di Kabupaten Malang ikut berpartisipasi dengan membuka gerai masing-masing. Tujuannya untuk mengenalkan produk dan pelayanan mereka kepada masyarakat. Meski bentuk pelayanannya swasta, mereka tetap menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan diwilayah Kabupaten Malang," jelasnya. Jum'at, (13/11/2026).

Beberapa agenda Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang mengusung tema "Sehat untuk Semua" meliputi :

• Cek Kesehatan Gratis (CKG) : Dinkes menyediakan pojok layanan CKG gratis untuk masyarakat umum yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan.

• Ekspo Kesehatan : Menyatukan berbagai layanan dari rumah sakit dan puskesmas se-Kabupaten Malang dalam satu ajang pameran dan sinergi pelayanan.

• Penuntasan Imunisasi Polio : Dinkes Kabupaten Malang memperkuat peran Posyandu di berbagai wilayah guna memastikan penuntasan imunisasi polio tanpa ada anak yang terlewat.

Menurut drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 menjadi momentum Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang untuk memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

"Tidak hanya menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan yang mengusung "Sehat untuk Semua" tersebut juga diramaikan oleh berbagai agenda edukasi dan promosi kesehatan, mulai dari senam sehat bersama, gelar wicara (talk show) kesehatan, pameran kesehatan, hingga Puskesmas Innovation Award yang melibatkan jajaran puskesmas di Kabupaten Malang," paparnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., juga mengatakan bahwa peringatan HKN tahun ini sengaja dipadukan dengan Hari Jadi

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (tengah), Usai Memberi Penghargaan Innovation Award ke Beberapa Puskesmas di Wilayah Kabupaten Malang.

Peringati HKN ke-62, Dinkes Kabupaten Malang Perkuat Posyandu Tuntaskan Imunisasi Polio



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., Saat Menyampaikan Rangkaian Agenda Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema "Sehat untuk Semua". **(Foto : Nino Wiwantara)**

KAB.MALANG, BN - Peringati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, Dinas Kesehatan (Dinkes), prioritaskan penuntasan imunisasi polio di Kabupaten Malang. Komitmen tersebut mengemuka dalam talkshow bertajuk melindungi setiap anak, menuntaskan polio, kolaborasi keluarga, posyandu, dan tenaga kesehatan yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Jum'at (13/11/2026).

Upaya tersebut, membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya tenaga kesehatan. Penguatan peran posyandu, kader kesehatan, hingga keluarga menjadi strategi untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi lengkap.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes., menyampaikan salah satu agenda Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam memperingati HKN yang mengusung tema "Sehat untuk Semua" meliputi talkshow, menghadirkan Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malang, Hj. Anis Zaidah Sanusi, serta dokter spesialis anak dr. Firyal Nadiah Rahmah, M.Biomed., Sp.A., CBCFF.

"Dalam kegiatan tersebut, kami menekankan pentingnya peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat agar dapat memberikan apresiasi atas dedikasi para kader yang selama ini membantu pelaksanaan berbagai program kesehatan di tingkat desa," katanya. Jum'at, (13/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malang Hj. Anis Zaidah Sanusi bersama dokter spesialis anak dr. Firyal Nadiah Rahmah menjadi narasumber talkshow tentang kolaborasi keluarga, posyandu, dan tenaga kesehatan dalam.

drg. Wiyanto Wijoyo, M.M.Kes, menyampaikan bahwa saat ini, TP PKK bersama Tim Pembina Posyandu terus mendorong evaluasi dan pembinaan kader, terutama di wilayah yang masih membutuhkan perhatian. Dari hasil monitoring terhadap 33 kecamatan di Kabupaten Malang, sebanyak 30 kecamatan yang telah dikunjungi menunjukkan aktivitas posyandu berjalan dengan baik. Pelayanan imunisasi di wilayah tersebut juga berlangsung tanpa kendala berarti.

"Upaya pemerataan imunisasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari mitos tentang imunisasi, kesibukan orang tua yang bekerja, hingga keterbatasan waktu untuk membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Malang, Hj. Anis Zaidah Sanusi juga menerangkan, bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari jumlah posyandu aktif maupun capaian imunisasi. Peme-

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malang, Hj. Anis Zaidah Sanusi (tengah), serta dokter spesialis anak dr. Firyal Nadiah Rahmah, M.Biomed., Sp.A., CBCFF (kiri) Saat Menjadi Narasumber Talkshow Tentang Kolaborasi Keluarga, Posyandu, dan Tenaga Kesehatan dalam.